

**IMPELEMNTASI AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA BUMDESMA
MAJU JAYA SENTOSA BALUNG LKD
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
NAHDIATUL FITRIA
214105030060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPELEMNTASI AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA BUMDESMA
MAJU JAYA SENTOSA BALUNG LKD
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:

NAHDIATUL FITRIA
NIM: 214105030060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA BUMDESMA
MAJU JAYA SENTOSA BALUNG LKD
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Nahdiatul Fitria

NIM: 214105030060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I

NIP. 197709142005012004

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA BUMDESMA
MAJU JAYA SENTOSA BALUNG LKD
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 27 Mei 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP 197608122008011015

Muzayyin, S.E.I., M.E.
NIP 197808142023211011

Anggota:

1. Dr. Nur Hidayat, S.E., M.M.

2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.

Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]:58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya* (Bandung: Mikhras Khazanah Ilmu, 2011), 45.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat kepada Rasulullah SAW yang selalu tercurahkan kepada kami. Sebagai tanda terimakasih dan bentuk apresiasi saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada kedua Orang tua saya Bapak WALI AMIN dan Almh. Ibu TITIK MASRIATUN yang saya sayangi dan cintai. Terima kasih banyak atas semangat dan dukungan kepada saya dalam perjuangan ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan jangka yang telah orang tua saya tetapkan. Saya hadiahkan karya yang dapat saya selesaikan kepada bapak dan ibu saya tercinta. Untuk ibu, saya ucapkan “Terima kasih sudah menjadi ibu yang paling terbaik dan sangat luar biasa, maafkan saya karena belum bisa membahagiakan ibu. Terima kasih banyak telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa.”
2. Kepada kakak-kakak saya dan adik saya yaitu (EVI, IDA, dan MITA) yang sangat saya sayangi dan cintai, terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada saya sampai saya bisa menyelesaikan kuliah ini dengan tepat waktu. Khususnya kepada kakak saya terima kasih karena sudah mendidik saya dan menjadi sosok seperti ibu yang selalu mendukung dan menyayangi saya.

3. Kepada seluruh Staff BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD, terimakasih banyak telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian dan terima kasih banyak atas dukungannya.
4. Kepada para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan para guru-guru saya dari TK sampai dengan SMA terimakasih banyak atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan yang setimpal.
5. Kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi terimakasih karna selalu membantu saya dalam hal apapun, terutama sahabat-sahabat saya di bangku kuliah ini yang selalu setia menemani saya, memberikan semangat dan membantu saya mulai dari semester 1 hingga semester 8 ini, terimakasih atas perjuangannya dan kesetiaannya kepada saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan setimpal dan semoga kita semua bisa sukses dengan cita-cita masing-masing.
6. Selamat kepada *nadia*, karena telah menyelesaikan tugas sebagai Mahasiswa dengan penuh semangat dan perjuangan yang sangat luar biasa. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri. Berbahagialah, kejarlah Impian besarmu, rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menjajakan kaki dan jangan sia-sia kan usaha dan doa yang kau langitkan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan dan perlindungan. Atas segala pertolongan, Rahmat, dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah Pada Usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD Kabupaten Jember” sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia dan yang telah membawa kita dari zaman permusuhan hingga zaman yang penuh persaudaraan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, dengan pertolongan Allah SWT. Serta semangat dan doa dari semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu H. Mariyah Ulfah, M.E.I. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sofiah, M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan memberikan pengetahuan dan ilmu untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh Staff BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada semua umat manusia terutama yang telah membantu dengan hati yang ikhlas dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini dari banyak sisi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Jember, 29 April 2025

ABSTRAK

Nahdiatul Fitria, Mariyah Ulfah, 2025: *Impelemntasi Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah Pada Usaha Bumdesma Maju Jaya Sentosa Balung Lkd Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan Neraca, Laba Rugi, BUMDesma Maju Jaya Sentosa.

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan yang bertujuan untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki jika terdapat kesalahan. Peran penting BUMDesma Maju Jaya Sentosa dalam mengelola dana desa untuk membangun perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Balung. Akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDesma sangatlah penting untuk dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lain. Dalam syariah akuntabilitas berarti tanggung jawab seseorang terhadap tindakan dan amanah yang diberikan, baik kepada Allah SWT maupun manusia, serta lembaga keuangan syariah harus menyusun laporan keuangan secara transparan. Dalam islam, akuntabilitas sangat penting karena merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung? 2) Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung? 3) Bagaimanakah kendala dalam penerapan akuntabilitas laporan keuangan syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Balung 2) Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Balung 3) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah pada BUMDesma Balung.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian, keabsahan data menggunakan jenis triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa: 1) Akuntabilitas laporan keuangan yang kelola oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa sudah sesuai dengan dimensi akuntabilitas finansial, terdapat 3 indikator yaitu integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan. Pertanggung jawaban pada laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. 2) Laporan laba rugi yang dikelola oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa sudah sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa menerapkan prinsip pada akuntabilitas finansial yaitu integritas keuangan atau kejujuran. 3) Dalam akuntabilitas laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak memiliki kendala.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Istilah..... | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| B. Kajian Teori..... | 28 |
| 1. Teori Agensi | 28 |
| 2. Teori Stakeholder | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Akuntabilitas | 30 |
| 4. Laporan Keuangan Syariah | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 46 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 46 |
| C. Subyek Penelitian..... | 47 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| E. Analisa Data | 50 |
| F. Keabsahan Data..... | 52 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 53 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 54 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 54 |
| 1. Sejarah BUMDesma Maju Jaya Sentosa..... | 54 |
| 2. Visi & Misi BUMDesma Maju Jaya Sentosa..... | 56 |
| 3. Struktur Organisasi BUMDesma Maju Jaya Sentosa | 58 |
| 4. Unit Usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa..... | 63 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 65 |
| 1. Penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung..... | 66 |
| 2. Penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung..... | 78 |
| 3. Kendala dalam penerapan akuntabilitas laporan keuangan syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung..... | 80 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| C. Pembahasan Temuan | 82 |
| BAB V PENUTUP | 93 |
| A. Simpulan | 93 |
| B. Saran-Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Lampiran 1 | : Matriks Penelitian |
| Lampiran 2 | : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan |
| Lampiran 3 | : Pedoman Wawancara |
| Lampiran 4 | : Surat Izin Penelitian |
| Lampiran 5 | : Surat Keterangan Selesai Penelitian |
| Lampiran 6 | : Jurnal Kegiatan Penelitian |
| Lampiran 7 | : Dokumentasi Penelitian |
| Lampiran 8 | : Surat Keterangan Lulus Plagiasi |
| Lampiran 9 | : Surat Keterangan Selesai Bimbingan |
| Lampiran 10 | : Biodata Penulis |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel BUMDesma di Kabupaten Jember..... | 8 |
| Tabel Penelitian Terdahulu | 27 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan pada lembaga keuangan terutama pada lembaga keuangan syariah saat ini memberikan penjelasan bahwa sistem ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan perekonomian konvensional. Dalam industri keuangan syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat tinggi dan yang paling berkembang adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Menurut data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyampaikan bahwa perkembangan LKMS mengalami peningkatan aset setiap tahunnya. Meningkatnya aset tersebut terjadi pada tahun 2015, besaran pada meningkatnya aset tersebut di tahun 2015 sebesar 27 miliar, pada tahun 2016 meningkat dua kali lipat yaitu sebesar 63 miliar, dan kemudian ditahun 2017 meningkat lebih pesat menjadi sebesar 99,96 miliar, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang paling besar yaitu 247,34 miliar.² Bertumbuhnya aset tersebut terjadi karena pemerintah mempercepat inklusi melalui keuangan syariah yang berdampak pada LKMS.

Dalam bidang ekonomi pemerintah pusat menggelontorkan dana desa yang sumbernya dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah menyiapkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dana tersebut adalah perimbangan dana APBN Kabupaten/Kota. Dengan adanya

² Alda Pratiwi, "Implementasi standar akuntansi keuangan syariah terhadap koperasi simpan pinjam dan pembiayaan bakti huria syariah di kota Palopo" *Repository UPT. Perpustakaan 2020*

dana tersebut diharapkan pemecaran pada desa terwujud dengan baik sesuai dengan aspek politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.³ Perkembangan akuntansi dalam sektor publik saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia, hal ini dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dalam menyiapkan laporan keuangan untuk menjalankan akuntansi publik. Laporan tersebut dapat memberikan manfaat dalam evaluasi kinerja manajerial. Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengolah keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.⁵ desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah masyarakat yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum yang diakui dalam NKRI. Makna dari hal tersebut adalah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kunci utama pada strategi perkembangan

³ Endang Kartini, Lalu Mimbar, Izrawati, "Impelementasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan pada UMKM krupuk di kota Mataram" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* vol. 6 no. 1

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2021), 27.

⁵ Firda Kusuma and Nur Ika Mauliyah, "Analysis of the Implementation of Behavioral Accounting Aspects and Understanding of The Village Funds Allocation (Add) In Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District", *Journal of Student Academic Research* Vol. 5 No. 2 (2020), 57.

desa adalah memperbaiki perekonomian desa yaitu terbentuknya BUMDesa/BUMDesma.⁶

BUMDesma adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang terletak di Kecamatan setempat dan mengelola lebih dari 1 desa secara bersama-sama. Berdirinya BUMDes tersebut didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pendirian, penggabungan, peleburan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷ Dengan adanya hal tersebut desa dapat melakukan kerjasama antara desa 1 dengan desa lain untuk mendirikan BUMDesma yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembentukan dana BUMDes diperuntukkan untuk menggerakkan perekonomian desa agar menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan berbagai kegiatan ekonomi dengan mengelola berbagai potensi yang dimiliki oleh desa secara produktif.⁸ Mengelola BUMDes dapat diartikan menjalankan bisnis milik masyarakat. Hal ini dikarenakan modal yang digunakan oleh BUMDes berasal dari dana desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama, secara teknik merupakan suatu organisasi yang berfungsi meningkatkan pendapatan desa berdasarkan hak dan kewenangan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu

⁶ Widya Nur Ramadhani, "Optimalisasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa dalam Pengembangan BUMDES (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sumbawa) *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 2021

⁷ Nabila Apriliany, Cantik Prameswari, dan Dra Kushdanajani, "Analisis Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Bumdesma Mandiri Sejahtera Pati)" *Journal of Politic dan Government Studies* Vol. 11 No. 3 (2022) 5.

⁸ Tria Shaliha Putri, Fitrotun Niswah, "strategi pengelolaan badan usaha milik desa bersama (BUMDesMa) di kecamatan sumbergempol kabupaten Tulungagung" *Journal Publika* vol. 9 no. 4 (2021).

organisasi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sebagai bentuk sebuah organisasi untuk meningkatkan perekonomian berdasarkan kebutuhan, dan potensi desa. Pemerintah memberikan peluang pada desa untuk dapat bekerjasama antara BUMDES satu dengan BUMDES lainnya, disamping itu BUMDES yang dibentuk oleh setiap desa dalam 1 kecamatan yang kemudian dikenal sebagai BUMDesma (Badan Usaha Miliki Desa Bersama).⁹

Akuntabilitas merupakan prinsip tata kelola pemerintah yang berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada suatu aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas mencakup luas yaitu pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal. Peran akuntabilitas sangat penting untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik.¹⁰ Penerapan akuntabilitas pada BUMDesma harus memenuhi asas akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Akuntabel yaitu pengelolaan pemerintah harus bertanggung jawab pada publik, Bertanggung jawab atas dana yang telah diterima dan yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan pada pihak yang mempunyai kepentingan.¹¹

⁹ Badrudin Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi Kasus BUMDesma Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Propo Kab. Pamekasan)" *Parlindungan Arief Nasution Publika* Vol. 11 No. 2 (2023) 1917.

¹⁰ Muhammad Nur Aziiz, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kuntabilitas Dana Desa" *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol. 6 No. 2 (2019) 334.

¹¹ Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa" *Jurnal Akuntansi Dan Governance* Vol. 1 No. 1 (2020) 63.

Laporan keuangan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan sebagai dampak dari aktivitas operasional selama suatu periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan umumnya menampilkan kondisi keuangan lembaga, termasuk aset tetap maupun aset tidak tetap.¹² Pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak internal memanfaatkan informasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang secara langsung mempengaruhi aktivitas internal perusahaan. Sementara itu, pihak eksternal menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Penyusunan laporan perusahaan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan utama. Laporan keuangan lainnya berperan sebagai pelengkap laporan keuangan utama.¹³

Peran akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting, faktor tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah yang meliputi faktor kesesuaian pada standar akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Undang-Undang efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen, pengambilan keputusan pada otoritas, budaya

¹² Agung Anggoro Seto dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 1-2.

¹³ Riva Ubar Harahap, Januri, dan Surya Sanjaya, "Implementasi SAK-45 Laporan Keuangan Nirlaba Pada Masjid Muhammadiyah Kota Medan" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 8 No. 2 (2021) 4-5.

organisasi, dan kompetensi pada sumberdaya manusia.¹⁴ Akuntabilitas berbasis syariah ini [enting digunakan dalam BUMDesma karena pertanggung jawaban sebuah organisasi bisnis dalam bentuk laporan hasil dan posisi keuangan dapat diwujudkan pada kontributor sumber daya keuangan dan juga kepada masyarakat. Penerimaan tanggung jawab yang terpenting dalam organisasi islam adalah Tuhan.¹⁵

Penerapan akuntabilitas dalam BUMDesma ini sangatlah penting digunakan, dikarenakan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan membantu perekonomian masyarakat. Akuntabilitas dalam laporan keuangan menurut standar syariah ini dirancang untuk menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap ketentuan agama islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, BUMDesma dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, pemerintah, dan mitra bisnis. Dalam BUMDesma Kecamatan Balung tersebut masyarakat lokal mayoritas beragama muslim yang tentunya dapat lebih meyakinkan bahwa pencatatan laporan keuangan tersebut sesuai dengan syariat yang ditentukan. Selain itu, penerapan laporan keuangan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas keuangan dan menghindari praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran islam.¹⁶

¹⁴ Aziiz, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa" 335.

¹⁵ Sri Wahyuni, Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 (2021) 43

¹⁶ Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi, "penerapan standar Akuntansi keuangan syariah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* vol. 2 no. 3 (2017)

Kabupaten Jember hampir semua kecamatan memiliki BUMDesma. Salah satu BUMDesma yang memiliki prestasi baik di Kabupaten Jember yaitu pada tahun 2024 BUMDesma Balung masuk nominasi 3 besar BUMDesma terbaik di Kabupaten Jember. Sehingga BUMDesma Balung dapat dijadikan contoh untuk BUMDesma lain. Dalam laporan keuangan BUMDesma Balung masih menggunakan komputer yaitu dalam excel dan pencatatan secara manual. Dalam pencatatan laporan keuangan tersebut dapat menggunakan Standar Akuntansi yang berbasis syariah yaitu untuk mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan mengikhtisarkan informasi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BUMDesma yang berbasis ekonomi islam dapat menerapkan sistem operasional yang jujur dan adil, tanpa kecurangan riba. Hal tersebut dapat membuat BUMDesma menjadi kepercayaan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan dan Pembangunan desa.

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwasanya untuk mempermudah dan menghindari hal buruk yang terjadi maka dianjurkan untuk mencatat dengan benar dan mencatat sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Allah Swt. Dianjurkan berperilaku jujur dan tidak mengurangi sedikitpun yang ada didalam laporan keuangan tersebut, sekecil apapun usaha yang dibangun harus memiliki pencatatan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar mempermudah dan jelas pencatatannya. Dalam islam sangat memperhatikan aturan tertulis dalam transaksi ekonomi, transparansi dan kejujuran menjadi pondasi dalam islam. Etika bisnis dalam islam menuntut tanggung jawab sosial dan akuntabilitas. Pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang ialah menghindari sengketa, dan merupakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Penerapan akuntabilitas pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa tersebut perlu diterapkan dikarenakan akuntabilitas atau tanggung jawab dana desa terdapat pada BUMDesma tersebut, karena tujuan berdirinya BUMDesma adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat. Berikut adalah data BUMDesma yang ada di Kabupaten Jember antara lain:

Tabel 1.1
Data BUMDesma di Kabupaten Jember

| No. | Kecamatan | Nama BUMDesma |
|-----|-------------|------------------------------------|
| 1. | Kalisat | Kalisat Sejahtera LKD |
| 2. | Panti | Chandra Kusuma Sejahtera LKD |
| 3. | Tanggul | Delapan Pilar Tanggul LKD |
| 4. | Sumberbaru | Sumber Baru Jaya LKD |
| 5. | Mumbulsari | Aksara Harta LKD |
| 6. | Arjasa | Arjasa Berseri LKD |
| 7. | Jelbuk | Jelbuk Makmur Sejahtera Abadi LKD |
| 8. | Sukorambi | Sukorambi Mandiri Jaya LKD |
| 9. | Sumberjambe | Jambewangi LKD |
| 10. | Jenggawah | Permata Gemilang Sejahtera LKD |
| 11. | Ledokombo | Ledokombo Jaya Sejahtera LKD |
| 12. | Rambipuji | Astha Kamulyan LKD |
| 13. | Sukowono | Kobenah Sejahtera LKD |
| 14. | Silo | Karya Gunitir LKD |
| 15. | Kencong | Bangkit Abadi LKD |
| 16. | Puger | Bumi Puger LKD |
| 17. | Ajung | Artha Mas Ajung LKD |
| 18. | Umbulsari | Kurnia Lestari LKD |
| 19. | Wuluhan | Amamah Sejahtera Sentosa LKD |
| 20. | Balung | Maju Jaya Sentosa Balung LKD |
| 21. | Gemukmas | Sukses Abadi LKD |
| 22. | Semboro | Semboro Makmur Sejahtera Abadi LKD |
| 23. | Jombang | Ngudi Raharja LKD |
| 24. | Mayang | Mayang Sejahtera LKD |
| 25. | Pakusari | Karya Dharma LKD |
| 26. | Bangsalsari | Abdi Sebelas Jaya Sejahtera LKD |

Sumber data: Berita Jatim 2023

Dari data diatas tercatat pada tahun 2023 Kabupaten Jember memiliki 26 BUMDesma. Dalam Kabupaten Jember sendiri terdapat 31 Kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 Desa.¹⁷ Kecamatan Balung memiliki 8 desa yang artinya memiliki 8 BUMDes yaitu:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. BUMDes Balung Lor | 5. BUMDes Karangduren |
| 2. BUMDes Balung Kulon | 6. BUMDes Karangsemanding |
| 3. BUMDes Balung Kidul | 7. BUMDes Curah Lele |
| 4. BUMDes Tutul | 8. BUMDes Gumelar |

Dari data diatas usaha yang dinaungi oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD ini ada 3 usaha yaitu:

1. Unit Usaha Dana Bergulir Masyarakat
2. Unit Usaha Kredit Barang
3. Unit Usaha Bahan Pokok Penting (Bapokting)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung. BUMDesma Maju Jaya Sentosa adalah transformasi dari program sebelumnya yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya tersebut dibentuk pemerintah untuk mendorong penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Balung dan membantu masyarakat dalam kemajuan ekonomi. BUMDesma Kecamatan Balung adalah badan usaha yang berperan penting dalam mengelola dana desa, yang mana dana tersebut digunakan untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 BUMDesma Maju

¹⁷ Oryza A. Wirawan, “26 Badan Usaha Milik Desa Bersama Resmi Berdiri di Jember“ 30 Januari 2023, Berita Jatim.com, 18:38. <https://beritajatim.com/26-badan-usaha-milik-desa-bersama-resmi-berdiri-di-jember>

Jaya Sentosa meraih penghargaan sebagai BUMDesma terbaik peringkat ke-2 se-Kabupaten Jember, dimana peringkat 1 diraih oleh BUMDesma Kecamatan Kencong dan peringkat ke 3 diraih oleh BUMDesma Kecamatan Mayang. Namun pada tahun 2024 BUMDesma Maju Jaya Sentosa mengalami penurunan yaitu peringkat ke-3 Kabupaten Jember.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada laporan keuangan dan mengelola laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan syariah atau yang telah ditetapkan. Dalam akuntabilitas di BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung dapat menerapkan sejauh mana sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah di BUMDesma Maju Jaya Sentosa, maka judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Syariah Pada Usaha Bumdesma Maju Jaya Sentosa Balung Lkd Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung?

¹⁸ Mochamad Erfan, diwawancarai oleh Penulis, Balung 21 April 2025.

2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan akuntabilitas laporan keuangan pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Balung.
2. Untuk mengetahui prinsip penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Balung.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan syariah di BUMDesma Balung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap yang telah diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, contohnya seperti manfaat untuk peneliti, instansi, dan masyarakat. Manfaat penelitian dilaksanakan secara realistis, sebagaimana yang disampaikan peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang terkait. Berikut adalah kegunaan dalam penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi atau patokan dalam penyusunan karya ilmiah dibidang akuntansi syariah khususnya mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai Penerapan akuntabilitas laporan keuangan pada usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung.
- b. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir semester di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban kepada pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah dan yang memiliki hak dan wewenang dalam pertanggung jawaban tersebut. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil kerja pemerintah melalui birokrasi harus bisa dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, hubungan antara pemberi tugas dan pelaksana tugas akan lebih terbuka dan saling percaya.

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang mencerminkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan tersebut, yang selanjutnya akan menjadi informasi yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan secara terperinci dan detail. Dari laporan tersebut dapat dihasilkan bahwa data yang mencerminkan tentang kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut bukan hanya terkait tentang gambaran umum aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan, akan tetapi akan memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan dalam keuangan dan operasionalnya. Oleh sebab itu, laporan keuangan menjadi kunci dalam mengevaluasi kesehatan finansial dan kemajuan pada suatu perusahaan.

3. Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa BUMDesa di dirikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes dimaksudkan supaya

keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu bagian/ langkah-langkah pembahasan yang menjelaskan mengenai bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Supaya materi yang disampaikan mudah dipahami, berikut adalah pembahasan yang tertera dalam penelitian ini:

- BAB I yaitu berupa pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.
- BAB II yaitu berupa kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.
- BAB III yaitu berupa metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV yaitu berupa penyajian data dan analisis yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahsan temuan.
- BAB V yaitu bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan dengan dilanjutkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

¹⁹ Dipa Rizka Humaira, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang" *Jurnal Ilmu Pemerintah Suara Khatulistiwa (JIPSK)* vol. VII No. 02 (2022).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini peneliti mencantumkan beragam hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang selanjutnya diringkas. Beberapa penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fadhilah Sukma Suci, Bambang Waluyo, Ida Syafrida (2024) dengan jurnal yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan kerangka kerja dalam penyusunan laporan keuangan wakaf menurut PSAK. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis sebagaimana bentuk sumber data adalah dokumentasi dan kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerangka kerja berkembang secara komprehensif dalam penyusunan laporan keuangan wakaf untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan wakaf. Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan karena dapat menyusun laporan keuangan lembaga wakaf yang sesuai PSAK. Implikasi pada temuan ini yaitu dapat memberikan solusi untuk lembaga wakaf dalam menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK

112, serta dapat memajukan pemahaman secara teoritis terhadap aplikasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam konteks lembaga wakaf.²⁰

Persamaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dalam laporan keuangan, dan juga metode yang digunakan oleh penelitian dan yang digunakan oleh peneliti sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu objek penelitian yaitu Yayasan Al Ihsan Permata Depok, sedangkan objek penelitian peneliti adalah BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD di kecamatan Balung.

2. Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufiq Hidayat (2024) dengan jurnal yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip pada akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa pada kelima desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, penerapan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tersebut tahapan dalam mengelola Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik

²⁰ Fadhilah Sukma Suci, Bambang Waluyo, Ida Syafrida, "Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok " *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi* Vol. 14 No. 17 (2024).

sesuai dengan prinsip Akuntabilitas dan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.²¹

Persamaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti adalah pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti tentang Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian peneliti adalah tentang laporan keuangan BUMDesma dan objek penelitian yang berbeda letak yaitu penelitian terdahulu terletak pada Kecamatan Sedati Sidoarjo sedangkan penelitian peneliti terletak pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung Kabupaten Jember.

3. Ida Ariani, Lince Bulutoding, Namla Elfa Syariati (2022) dengan jurnal yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kondisi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa berbasis *syariah enterprise theory* agar dapat mewujudkan good governance di Desa Buntu Sarong. Metode yang digunakan oleh penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan sumber data menggunakan data primer yang diambil langsung dari informan melalui metode wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Dari penjelasan diatas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola

²¹ Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufiq Hidayat, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa DiKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing* Vol. 5 No. 1 (2024).

keuangan desa di Desa Buntu Sarong telah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan benar dan baik, hal tersebut dikarena berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini terbukti dari pengelolaan dana desa yang awalnya dengan musrembangdes yang mencakup partisipasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa. Selain itu, pemerintahan didesa Buntu Sarong juga menanamkan nilai spiritual pada pengelolaan dana desa dan menyadari pertanggungjawaban secara vertical kepada Allah SWT, dan kepada manusia dan alam secara horizontal sesuai dengan prinsip *syariah enterprise theory*.²²

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis syariah dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah objek penelitian, penelitian terdahulu tersebut terletak di Desa Buntu Sarong sedangkan penelitian peneliti terletak pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung Kabupaten Jember.

4. Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, Firda Ayu Amalia (2022) dengan jurnal yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. Pada penelitian yang dilakukan bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid di Kota Malang terutama pada masjid yang dikelola oleh civitas akademik dan non akademik. Objek penelitian yaitu 4 masjid besar yang berada di Kota Malang yaitu Masjid AR Fachruddin, Masjid An-Nur Politeknik, Masjid

²² Ida Ariani, Lince Bulutoding, Namla Elfa Syariati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory” *Islamic Accounting and Finance Review* Vol. 3 No. 1 (2022).

Abu Dzar Al Ghifari, Masjid Sabilillah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masjid yang biasanya hanya menyajikan laporan keuangan dimana hanya mencakup penerimaan yang umumnya diperoleh dari para jama'ah dan pengeluaran kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masjid sudah memiliki laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengelola keuangan masjid telah memenuhi nilai-nilai prinsip akuntansi syariah: pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh rasul: siddiq, Amanah, thabligh dan fathanah. Meskipun, dalam penelitian ini menemukan bahwa praktik akuntansi masih belum sesuai dengan standar akuntansi bagi entitas nirlaba. Hal ini karena bagian pengelola keuangan tidak memiliki latar belakang keuangan. Publikasi keuangan masjid Sebagian besar diumumkan pada saat menjelang shalat jum'at dan ditempelkan di mading.²³

Persamaannya adalah penelitian diatas dengan yang sedang diteliti adalah metode yang digunakan sama-sama metode kualitatif deskriptif dan penelitian diatas serupa meneliti mengenai akuntabilitas dalam laporan keuangan. Namun, perbedaannya adalah penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti terletak pada objek penelitian, penelitian

²³ Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, Firda Ayu Amalia, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid" *Jurnal Akuntansi* Vol. 13 No. 2 (2022).

terdahulu tersebut buakn hanya 1 objek tetapi ada 4 masjid yang terletak pada masjid di Kota Malang.

5. Tirta Ayu Lestari, Citra Indah Merina (2022) dengan jurnal yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Disimpulkan bahwa penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan adana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal penglolaan alokasi dana desa didesa Bumi Ayu. Sedangkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dinilai telah berjalan cukup baik karena melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengalokasiannya, serta adanya tanggung jawab dalam pengelolaan dana sesuai ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun demikian,

aspek akuntabilitas pelaporan, khususnya dalam hal laporan realisasi pelaksanaan, masih belum sepenuhnya optimal.²⁴

Persamaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Namun, perbedaannya dari penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu tidak membahas tentang laporan keuangan sedangkan penelitian peneliti membahas tentang laporan keuangan dan objek penelitiannya, penelitian tersebut terletak pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali sedangkan penelitian peneliti terletak pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung Kabupaten Jember.

6. Shierly Tiara Princessa, Zulhelmy, Nina Nursida (2022) dengan jurnal yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Penyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. Pada penelitian diatas mempunyai tujuan yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Penyalaian. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa dana desa Nagari Penyalaian telah mencerminkan prinsip akuntabilitas yaitu sudah sesuai atau akuntabel, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah desa Nagari mengatakan

²⁴ Tirta Ayu Lestari, Citra Indah Merina, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4 No. 5 (2022).

bahwa laporan keuangan realisasi pelaksanaan APBN desa pada bulan maret, padahal seharusnya laporan tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya informasi yang menjelaskan mengenai kas yang masuk dan keluar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa.²⁵

Pada persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti adalah keduanya sama-sama meneliti tentang akuntabilitas serta metode yang digunakan. Namun, perbedaannya adalah berada di fokus penelitian, penelitian terdahulu tersebut mendeskripsikan serta menjelaskan pada akuntabilitas dan transparansi meski penelitian yang diteliti adalah penerapan dalam akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah.

7. Siti Aminatun Naslikhah, Yuni Sukandani, Mutiara Rachman Ardhani (2022) dengan jurnal yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dana BOS dalam akuntabilitas dan transparansi pada SDN Sawocangkring. Jenis penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Sawocangkring telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, serta telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana

²⁵ Shierly Tiara Princessa, Zulhelmy, Nina Nursida, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Penyaliaan Kecamatan X Koto Sumatera Barat" *Journal of Islamic Finance and Accounting Research* Vol. 1 No. 2 (2022).

tercantum dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung program-program sekolah dan dikelola secara akuntabel dan transparan. Bentuk transparansi tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada publik, salah satunya dengan menempelkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disahkan pada papan informasi di lingkungan sekolah.²⁶

Persamaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti ialah keduanya sama-sama meneliti tentang akuntabilitas serta metode yang digunakan. Namun, perbedaannya adalah objek penelitiannya, penelitian diatas tersebut terletak pada SDN Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo sedangkan penelitian peneliti terletak pada BUMDesma Balung dan penelitian terdahulu membahas tentang dana bantuan operasional sekolah sedangkan peneliti membahas tentang laporan keuangan.

8. Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga (2021) dengan jurnal yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus Ina HUK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ina Huk Desa Mata Air Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Penelitian ini menggunakan 3 prinsip akuntabilitas adalah integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, pada

²⁶ Siti Aminatun Naslihhah, Yuni Sukandani, Mutiara Rachman Ardhani, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo" *Journal of Sustainability Business Research* Vol. 3 No. 3 (2022).

transparansi menggunakan 2 prinsip yaitu: informatif dan indikator yang terdiri dari tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara dengan sejumlah informan yaitu Kepala Desa, staff BUMDes dan beberapa pihak masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi, hal tersebut terjadi dikarenakan laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan standar laporan keuangan SAK EMKM.²⁷

Persamaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti adalah keduanya sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dalam pelaporan keuangan BUMDes dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Namun, perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu tersebut terletak pada BUMDes Ina Huk Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada BUMDESMA Maju Jaya Sentosa Balung LKD.

9. Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Nuwun Priyono (2020) dengan jurnal yang berjudul Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam Kajian Literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pada

²⁷ Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus Ina HUK)" *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* Vol. 9 No. 1 (2021).

PSAK 109 sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan BAZIS, sekaligus sebagai pedoman yang menyederhanakan bahasa teknis dalam PSAK 109 guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, mengingat situasi pandemi yang membatasi pelaksanaan penelitian lapangan sesuai dengan protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan bahasa dalam penyajian laporan keuangan BAZIS yang berpedoman pada PSAK 109 dapat memudahkan para pegawai dalam memahami serta menyusun laporan keuangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.²⁸

Persamaan dari penelitian diatas adalah sama membahas mengenai akuntabilitas dalam laporan keuangan. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas adalah metode penelitian yang digunakan, metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan dan yang digunakan oleh penelitian peneliti adalah metode kualitatif deskriptif.

10. Abrar Fauzi Maulana, Ridwan (2020) dengan jurnal yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' di Kota Banda Aceh). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid jami di Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah

²⁸ Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Nuwun Priyono, "Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam Kajian Literatur" *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* Vol. 3 No. 2 (2020).

penelitian metode deskriptif kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah Masjid Jami' di Banda Aceh, subjek penelitiannya adalah pengelola keuangan dan bagian BKM Masjid Jami'. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi akuntabilitas dan transparansi terhadap keuangan pemberitaan masjid Jami' di Kota Banda Aceh sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam melaksanakan kegiatan, pengurus masjid Jami' telah mengikuti aturan yang menjadi tradisi dalam kepengurusan masjid. Dalam pelaporan keuangan masjid telah memenuhi penerapan transparansi yaitu dengan adanya akses laporan keuangan masjid oleh jamaah melalui publikasi dan media yang telah disediakan, pengurus juga mendapat saran dan kritikan dari jamaah.²⁹

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti adalah sama penggunaan metode yaitu metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dan penelitian yang diteliti terletak pada objek penelitiannya, penelitian diatas bertempat pada 20 Masjid di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian peneliti terletak pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung.

²⁹ Abrar Fauzi Maulana, Ridwan, "Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' di Kota Banda Aceh)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 5 No. 2 (2020).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Fadhilah Sukma Suci, Bambang Waluyo, Ida Syafrida (2024). | Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok | a. Variabel penelitian b. Metode penelitian | Objek penelitian |
| 2. | Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufiq Hidayat (2024). | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo | a. Metode penelitian b. Membahas tentang akuntabilitas | a. Membahas tentang Alokasi Dana Desa b. Objek penelitian |
| 3. | Ida Ariani, Lince Bulutoding, Namla Elfa Syariati (2022). | Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory | a. Variabel penelitian b. Metode penelitian | Objek penelitian |
| 4. | Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, Firda Ayu Amalia (2022). | Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid | a. Metode yang digunakan b. Subjek penelitian | Objek penelitian |
| 5. | Tirta Ayu Lestari, Citra Indah Merina (2022). | Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) | a. Metode penelitian b. Membahas tentang akuntabilitas | a. Objek penelitian b. Membahas tentang Pengelolaan Dana Desa |
| 6. | Shierly Tiara Princessa, | Akuntabilitas dan Transaparansi | a. Pembahasan terkait dengan | a. Objek penelitian b. Pembahasan |

| No | Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|--|--|
| | Zulhelmy, Nina Nursida (2022). | Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Penyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat | a. akuntabilitas. b. Metode yang digunakan kualitatif. | terdapat Pngelolaan Dana Desa |
| 7. | Siti Aminatun Naslikhah, Yuni Sukandani, Mutiara Rachman Ardhani (2022). | Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo | a. Metode yang digunakan. b. Pembahasan terkait dengan akuntabilitas | a. Objek penelitian b. Pembahasan terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah |
| 8. | Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga (2021). | Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus Ina HUK). | a. Pembahasan terkait dengan akuntabilitas dalam laporan keuangan. b. Metode yang digunakan | Objek penelitian. |
| 9. | Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Nuwun Priyono (2020). | Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam Kajian Literatur. | Pembahasan terkait dengan akuntabilitas | a. Objek penelitian b. Metode yang digunakan |
| 10. | Abrar Fauzi Maulana, Ridwan (2020). | Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' di Kota Banda Aceh) | a. Metode yang digunakan b. Pembahasan terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan | Objek penelitian |

B. Kajian Teori

1. Teori Agensi

Agency theory atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent* dimana *principal* mendelegasikan wewenang, kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha

sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan.³⁰ Teori agensi menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen organisasi. Di dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik. Namun, dalam prakteknya pemerintah terkadang bertindak diluar dari fungsinya dengan membatasi akses informasi antara agen dan principal. Dengan adanya batasan tersebut kerdidak percayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah terhadap hasil evaluasi kinerjanya.

Teori agensi memberikan peranan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian tersebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan tersebut sering diasosiasikan dengan peranan pengurusan akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada principal tentang kejadian dimasa lalu. Hal tersebut yang memberikan akuntansi nilai umpam baliknya selain nilai presiktifnya.³¹

2. Teori Stakeholder

Teori stakeholder (*Stakeholder Theory*) pertama kali ditemukan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dan telah berkembang menjadi salah satu teori utama dalam manajemen strategis dan etika bisnis. Teori

³⁰ Jamaluddin, Anwar Enre, "Kontruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh" *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol. 5 No. 2 (2023), 164.

³¹ Mikael Edowai, Miah Said, dkk, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 8-9.

ini berpendapat bahwa perusahaan harus mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Teori stakeholder menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan demi kepentingan pemilik, namun harus mempertimbangkan bagaimana kegiatan bisnis mempengaruhi *stakeholder*.³²

Menurut freeman stakeholder berarti pribadi ataupun tim pribadi yang ada hubungan saling berpengaruh terhadap proses pada entitas untuk mencapai visi entitas. Teori ini lebih menekankan pada tanggung jawab yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan ekonomi entitas. Dan entitas dengan sukarela memberikan informasi mengenai intelektual, lingkungan serta sosial agar diakui oleh pemangku kebutuhan. Sehingga tanggungjawab tidak hanya terletak pada kinerja keuangan tetapi kondisi sosial entitas/keadaan lingkungan.³³

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban kepada pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang telah menjadi

³² Melan Saputri, Hoei Kylie Christine Abigail, Meidieta Livana, "Penerapan Teori Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)" *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* vol. 1 no. 4 (2024), 462.

³³ Vivi Kumalasari Subroto, Eni Endaryati, *Kumpulan Teori Akuntansi* (Semarang: Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan Universitas STEKOM, 2023), 18.

tanggung jawabnya pada pihak yang memberi amanah dan yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggung jawaban tersebut.³⁴ Selain itu, bentuk dari pertanggung jawaban dalam laporan keuangan adalah LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyampaikan dokumen yang berisi mengenai laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berkaitan dan paling lambat selama 10 bulan berikutnya.³⁵ Dalam Al-Qur'an akuntabilitas telah dijelaskan bahwa wajib memiliki sikap amanah (dapat dipercaya) dan adil. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]:58).³⁶

Dalam islam, akuntabilitas menjelaskan bahwa semua umat manusia selaku pemegang amanah, bukan pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Dalam islam, manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang mengandung maksud amanah sekaligus

³⁴ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2021), 18.

³⁵ Suprianik, Nilufarul Izzabillah, "Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan APBD Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Bondowoso" *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol. 2 No. 1 (2024), 290.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya*, 45.

peran sebagai perwakilan dari Allah SWT. Konsep akuntabilitas dalam islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Keadilan dalam perspektif islam mencerminkan dimensi horizontal yang menciptakan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta atau yang lebih dikenal dengan sunnatullah.³⁷ Prinsip akuntabilitas menurut islam adalah sebuah hal yang erat kaitannya dengan pengakuan, pencatatan, serta etika pada bentuk transaksi yang oleh dilakukan pemegang amanah. Sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan tanggung jawab ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka dari itu sistem akuntabilitas juga memegang peran penting dalam permasalahan dana desa.³⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelola sumber daya serta pelaksana kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Agar dapat diketahui sejauh mana prinsip akuntabilitas maka dapat dilihat pada dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*). Dalam akuntabilitas ini berarti lembaga publik yang

³⁷ Sri Wahyuni, Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 (2021) 43-44.

³⁸ Nikmatul Masruroh, Samsul Arifin, dkk, "Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 2 (2023).

berperilaku jujur dan taat akan ketentuan hukum yang berlaku dalam bekerja. Pemanfaatan dana publik harus dilakukan dengan benar dan sudah menerima otorisasi. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 mengemukakan bahwa akuntabilitas hukum mempunyai indikator akuntabilitas sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik, akuntabilitas ini dapat dilihat menurut prosesnya yaitu: ketelitian (akurasi), profesionalitas dalam petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
 - b) Akuntabilitas biaya pelayanan publik, akuntabilitas ini adalah biaya pada pelayanan diambil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
 - c) Akuntabilitas produk pelayanan publik, pada akuntabilitas ini persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
- 2) Akuntabilitas manajerial (*Managerial Accountability*) merupakan pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengendalian organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang artinya proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak

terjadi inefisiensi dan tidak efektif dalam organisasi. Menurut *Discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board* Sekretariat Canada dalam Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas majaerial sebagai berikut:

- a) Peran yang jelas hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya Ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Dapat terjadi adanya seseorang yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah dan menjadi sulit.
- b) Harapan dan kinerja yang jelas setiap seseorang dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas. Jika tidak melakukan maka kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
- c) Pelaporan kredibel pelaporan kinerja, pelaporan ini berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu dan dalam cara menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
- d) Ulasan wajar dan penyesuaian, dalam hal ini harus ada tindak lanjut dimana harapan kinerja belum terpenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau Tindakan lain untuk mengatasi kendala.

3) Akuntabilitas program (*Program Accountability*) merupakan lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program artinya program-program organisasi hendaknya program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Menurut Halim indikator akuntabilitas program sebagai berikut:

- a) Hasil dari program yang dijalankan.
- b) Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
- c) Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.

4) Akuntabilitas kebijakan (*Policy Accountability*) merupakan lembaga publik yang dianjurkan dapat mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang ditetapkan dengan memperhitungkan dampaknya kedepan.³⁹ Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Halim sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas Keatas, yaitu menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.
- b) Akuntabilitas keluar, yaitu tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.

³⁹ Salihi, Ignasius Ridwan Hutauruk, Hasnarika, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bitan" *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* Vol. 2 No.6 (2023), 771-772.

- c) Akuntabilitas kebawah, yaitu menunjukkan setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebaik apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil jika dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
- 5) Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*) merupakan akuntabilitas pertanggung jawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi. Akuntabilitas ini menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik. Indikator dari akuntabilitas finansial sebagai berikut:
- a) Integritas keuangan, yaitu laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
 - b) Pengungkapan, yaitu konsep pengungkapan yang mewajibkan agar laporan keuangan di desain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi informasi. Akan lebih mudah mempertanggungjawabkan maka dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi.

- c) Ketaatan, yaitu taat kepada peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu laporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.⁴⁰

b. Manfaat Akuntabilitas

Secara umum *accountability* dan *responsibility* merupakan tugas yang diberikan kepada bawahan supaya dapat dilaksanakan tugas tersebut sesuai dengan kewajibannya. Berikut adalah manfaat akuntabilitas dalam upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada suatu organisasi yaitu:

- 1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat
- 2) Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness*.
- 3) Mendorong partisipasi
- 4) Menjadikan pemerintah desa lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.

⁴⁰ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, Miah Said, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021), 27-28.

- 6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- 7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

Akuntabilitas dana desa merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, hal tersebut memegang teguh prinsip-prinsip pada indikator *good governance*. Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa akuntabilitas dana desa harus dilakukan secara terbuka dan melalui musyawarah desa.⁴² Pada umumnya, Akuntabilitas merupakan permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jelasa. Suatu organisasi bisa dikatakan akuntabel adalah jika organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk pada keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

⁴¹ Wiwiek Kusumaning Asmoro, Novie Astuti Setianingsih, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana "Prodamas" dalam Mewujudkan *Good Governance* di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri" *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2019).

⁴² Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, dkk, "Mewujudkan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa" *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* Vol. 07 No. 01 (2019).

⁴³ Muhammad Sawir, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022), 1-3.

4. Laporan Keuangan Syariah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan metode yang paling penting dalam menyampaikan data yang moneter kepada pihak eksternal/luar. Menurut Maith, laporan keuangan tahunan adalah catatan informasi tentang keuangan suatu entitas dalam kerangka waktu pembukuan yang digunakan untuk menggambarkan suatu entitas.⁴⁴ Penjelasan lain menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan bagaimana keadaan keuangan sebagai efek dari kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan keuangan umumnya menyusun kondisi keuangan lembaga yang meliputi aset lembaga baik aset tetap maupun tidak tetap.⁴⁵ Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil tinjauan dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara tepat dalam satuan uang yang kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk memecah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya dan mengamati masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh

⁴⁴ Senator Iven Budianto, Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi" *SIMBA Seminar Inovasi Majemen Bisnis dan Akuntansi 3* (2021).

⁴⁵ Agung Anggoro Seto dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 1-2.

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.⁴⁶ Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi posisi keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan juga terdapat informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Dilakukannya analisis dengan membandingkan data keuangan di dua periode atau lebih dapat menghasilkan data yang lebih rinci. Sehingga rincian data tersebut dapat digunakan untuk mendukung suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan syariah berbeda dengan laporan keuangan konvensional karena laporan keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, pembagian risiko, transparansi, dan kesucian kontrak. Laporan keuangan syariah harus menyediakan informasi mengenai kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, tingkat keuntungan investasi bagi penanam modal dan pemilik dana syirkah infak, sedekah, dan wakaf. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 adalah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah yang disebut laporan keuangan.⁴⁷ Sedangkan laporan keuangan konvensional sesuai dengan PSAK 5 tentang segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi

⁴⁶ Syaharman, SE, M.Si, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Narasindo Mitra Perdana" *Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan* Vol. 4 No. 2 (2021).

⁴⁷ Intan Oktaviani, Cepi Saepuloh, "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Itqan" *MES Management Journal* Vol. 3 No. 1 (2024).

sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas tersebut beroperasi.

Analisis laporan keuangan syariah merupakan analisis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang mencakup status keuangan suatu instansi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah terdapat 7 komponen penting, sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan

Atau yang biasa disebut neraca merupakan menyajikan posisi keuangan sebuah entitas syariah pada tanggal tertentu yang menyajikan aset lancar yang terpisah dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka pendek yang terpisah dengan liabilitas jangka panjang, dana syirkah temporer dan ekuitas. Ini menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal.

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laba rugi merupakan entitas syariah yang memperlihatkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan oleh perusahaan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen utama dalam laporan keuangan syariah yang mencakup laba atau rugi bersih

pada periode tertentu, laporan ini penting karena dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih, yang dapat mencerminkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan entitas.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan PSAK yaitu memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar dari suatu entitas. Laporan arus kas memiliki fungsi yang sama dengan laporan arus kas pada umumnya, tetapi laporan ini harus mencerminkan prinsip syariah yaitu pemisahan pendapatan dari kegiatan halal dan non-halal.

5) Laporan Sumber Penggunaan Zakat

Laporan sumber penggunaan zakat merupakan hal yang penting dalam laporan keuangan syariah yaitu entitas syariah yang menyajikan laporan secara detail tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat yang berasal dari wajib zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dan akhir zakat.

6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini merupakan penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah yang diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan, laporan ini memparkan dana kebajikan diperoleh dan digunakan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang harus disajikan secara terstruktur untuk menjelaskan lebih detail dan terperinci atas pos-pos laporan keuangan dan setiap pos harus berkaitan dengan informasi yang ada pada catatan laporan keuangan tersebut.⁴⁸

b. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

- 1) *Screening* (Sarana Informasi), yaitu analisa yang hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan begitu seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan yang dianalisa.
- 2) *Understanding* (Pemahaman), yaitu analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
- 3) *Forecasting* (Peramalan), yaitu analisa yang dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.

⁴⁸ Endah Tri Wahuyingtyas, Niken Savitri Primasari, dkk, *Analisis Laporan Keuangan Syariah* (Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, 2021), 3-4.

- 4) *Diagnosis* (Diagnose), yaitu analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
- 5) *Evaluation* (Evaluasi), yaitu analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.⁴⁹

Tujuan dari laporan keuangan syariah itu sendiri untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang besar sebagian diperuntukkan dalam pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan rasa pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan.⁵⁰ Akuntansi syariah di atur dalam PSAK 101 memuat mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum, untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan syariah, agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Karakteristik umum laporan keuangan syariah, sebagai berikut:

- a) Dasar Akrua, yaitu entitas syariah harus Menyusun laporan keuangan atas dasar akrua kecuali laporan arus kas dan

⁴⁹ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 4-5.

⁵⁰ Endah Tri Wahuyingtyas, Niken Savitri Primasari, dkk, *Analisis Laporan Keuangan Syariah* (Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, 2021), 5.

perhitungan pendapatan tujuannya untuk pembagian hasil usaha.

- b) Materialitas dan penggabungan, yaitu pos material disajikan dalam laporan secara terpisah kecuali saling dihapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.
- c) Saling hapus, maksudnya aset, liabilitas, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah.
- d) Frekuensi pelaporan, yaitu laporan keuangan disajikan secara tahunan.
- e) Informasi komparatif, yaitu harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan SAK.

f) Konsisten penyajian, yaitu klasifikasi dan penyajian pos dalam laporan keuangan antas periode harus konsisten.⁵¹

Berdasarkan paparan teori diatas, dalam penelitian ini peneliti tertarik mengambil jenis akuntabilitas finansial, yang memiliki 3 indikator yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan. Hal tersebut dikarenakan akuntabilitas finansial merujuk pada kewajiban suatu entitas seperti pemerintahan, organisasi non-profit, dan perusahaan untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan dengan cara jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

⁵¹ Endah Tri Wahuyingtyas, Niken Savitri Primasari, dkk, *Analisis Laporan Keuangan Syariah* (Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, 2021), 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode yaitu Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kualitatif ialah suatu strategi yang bertujuan memperoleh data berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan dan partisipan, serta perilaku yang tampak. Pendekatan ini menitikberatkan pada kondisi alamiah sebagai sumber data utama. Selain itu, metode ini bersifat deskriptif dan lebih memfokuskan perhatian pada proses pelaksanaan penelitian dibandingkan hasil akhirnya.⁵²

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibantu oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Laporan Keuangan Berbasis Syariah pada Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma).

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian tentang Implementasi Akuntabilitas Laporan Keuangan berbasis syariah BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan menurut syariah karena pada BUMDesma Balung tersebut belum menerapkan

⁵² Lexy, Moleong, Perpustakaan.go.id, 2006: 04, <https://opac.perpusnas.go.id>

pencatatan laporan keuangan sesuai dengan yang telah ditentukan. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BUMDesma Balung di Jln. Kalimantan No. 157, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik purposive. Purposive adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini contohnya seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang di teliti.⁵³

1. Mohammad Soni S.E selaku Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa
2. Vrisqi Safitri I selaku Sekertaris BUMDesma Maju Jaya Sentosa
3. Ika Desivitasari selaku Bendahara keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa
4. Nasabah BUMDesma Maju Jaya Sentosa

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan-pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan memadai terhadap fenomena yang sedang diselidiki, antara lain sebagai berikut:

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 218-219.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵⁴ Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Lokasi atau tempat di Jln. Kalimantan No. 157, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
- b. Kondisi Kantor BUMDesma Balung

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melangsungkan diskusi atau dialog langsung antara peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁵ Wawancara dilakukan guna memperoleh data atau informasi mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan berbasis syariah di BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung. Narasumber yang ditentukan oleh peneliti adalah Direktur BUMDesma Balung, jajaran pegawai dibawahnya dan nasabah. Wawancara yang dilakukan yaitu semi-terstruktur adalah metode penelitian yang menggabungkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Data yang akan diperoleh dari hasil wawancara adalah:

- a. Bentuk akuntabilitas dalam laporan keuangan pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 226.

⁵⁵ Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

- b. Laporan keuangan neraca dan laba rugi BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan Teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu sehingga dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat data.⁵⁶ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang diperoleh dari narasumber. Dokumen-dokumen ini berisi tentang berbagai jenis, seperti catatan, surat, laporan, foto, rekam audio atau video, dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat memberikan informasi tambahan, mendukung temuan dari observasi atau wawancara, serta membantu peneliti dalam memahami konteks atau latar belakang dari fenomena yang diteliti.

Penelitian ini memperoleh dokumentasi dari pihak kantor BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung berupa foto, gambar, struktur, laporan, rekam audio atau video. Dokumen-dokumen tersebut bisa memberikan informasi tambahan, mendukung temuan dari observasi atau wawancara, serta membantu peneliti dalam memahami konteks atau latar belakang fenomena yang diteliti.

⁵⁶ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

E. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mempermudah dan dipahami juga dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya untuk mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan dalam aneka macam (wawancara dan dokumentasi) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis),

⁵⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV pustaka Ilmu, 2020), 161.

tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁵⁸

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus terhadap masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan Kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil dari wawancara yang telah direkam dan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan akan disajikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Peneliti ini memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini.

⁵⁸ Muhammad Basri dkk, "Nilai-Nilai Sejarah Berbasis Local Wisdom Situs Batu Berak Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no.2 (2020):127.

4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu Kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik Kesimpulan dari data yang di dapat. Tujuan dari penarikan Kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan, dan hubungan.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Setelah pengumpulan data, sebelum peneliti melaporkan hasilnya. peneliti mengkaji ulang data yang didatakan. Hasil observasi dan wawancara tersebut yang dihasilkan dari data crosscheck dan information yang diperoleh dari peneliti dapat verification keabsahannya dan bisa dimintai pertanggung jawaban. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan memeriksa kefaktaan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan meminimalkan objektifitas yang timbul saat pengumpulan dan analisis data. Terdapat 3 jenis triangulasi yaitu, triangulasi Teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber atau informan untuk meningkatkan kredibilitas data.⁶⁰

⁵⁹ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. 124

⁶⁰ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol.1No.1 (2023), 53–61.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan secara berurutan oleh peneliti. Proses ini penting untuk memastikan kesinambungan pemikiran yang akhirnya akan menghasilkan temuan penelitian yang berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penelitian
 - a. Membuat rencana penelitian
 - b. Menentukan tempat penelitian
 - c. Mengurus izin penelitian
 - d. Melakukan pengamatan langsung di Lokasi Penelitian
 - e. Memilih Informan
 - f. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Prinsip-prinsip etika ketika melakukan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mengunjungi Lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Analisis data

Dalam tahap ini, peneliti menyusun laporan hasil penelitian setelah melakukan analisis data yang kemungkinan telah disesuaikan dengan bimbingan dari dosen untuk dapat memastikan hasil penelitian yang optimal. Laporan yang telah selesai disiapkan akan disampaikan kepada penguji sebagai bagian dari pertanggungjawaban penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BUMDesma Maju Jaya Sentosa

BUMDesma merupakan badan usaha milik desa yang modal awalnya dibiayai oleh pemerintah untuk membantu masyarakat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes didirikan dalam bentuk menampung kegiatan masyarakat dibidang ekonomi dan pelayanan umum.⁶¹

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Maju Jaya Sentosa Balung LKD kecamatan Balung merupakan badan usaha yang berdirikan desa dan dibentuk secara kolektif melalui kerjasama antar desa se-kecamatan Balung untuk mendaya gunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dikecamatan Balung Kabupaten Jember. Dengan adanya program BUMDesma tersebut sangat membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Masyarakat dapat pinjaman tanpa ada jaminan apapun, masyarakat cukup menyerahkan fotocopy KTP saja.

Di periode 2024 realisasi kinerja keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun-tahun

⁶¹ Abd Rohman Al Hadifi, Faridatur Rosyidah, Firman Ardiyansyah, Ridan Muhtadi, "BUMDesMa Kampung Tani: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad Syariah DiKabupaten Pamekasan" *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* Vol. 1 No. 1 (2021), 196. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/171/129>

sebelumnya dalam beberapa unsur yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan posisi keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa. Kenaikan aset tersebut dapat dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas dan ekuitas masing-masing. Dengan adanya penambahan unit usaha sangat berpengaruh terhadap Upaya peningkatan pendapatan, posisi aset setelah mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar 6,84% yang signifikan.⁶² BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD memiliki prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Profesional, artinya tata kelola dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.
- b. Demokratis, yaitu setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- c. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa bersama “MAJU JAYA SENTOSA BALUNG LKD“ harus melakukan kerjasama yang baik demi perkembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- d. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa bersama “MAJU JAYA SENTOSA BALUNG LKD“ harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa bersama.

⁶² Mochamad Erfan, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

- e. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- f. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- g. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- h. Prioritas sumber daya lokal, artinya dalam menjalankan usahanya, BUMDesa bersama harus mengutamakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat.
- i. Keberlanjutan, artinya pengembangan BUMDesa bersama diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Visi & Misi BUMDesma Maju Jaya Sentosa

- a. Visi BUMDesma sebagai berikut:

Visi BUMDesa Bersama “MAJU JAYA SENTOSA BALUNG” adalah profesional dan akuntabel dalam upaya meningkatkan profitabilitas untuk kesejahteraan masyarakat kecamatan Balung.

b. Misi BUMDesma sebagai berikut:

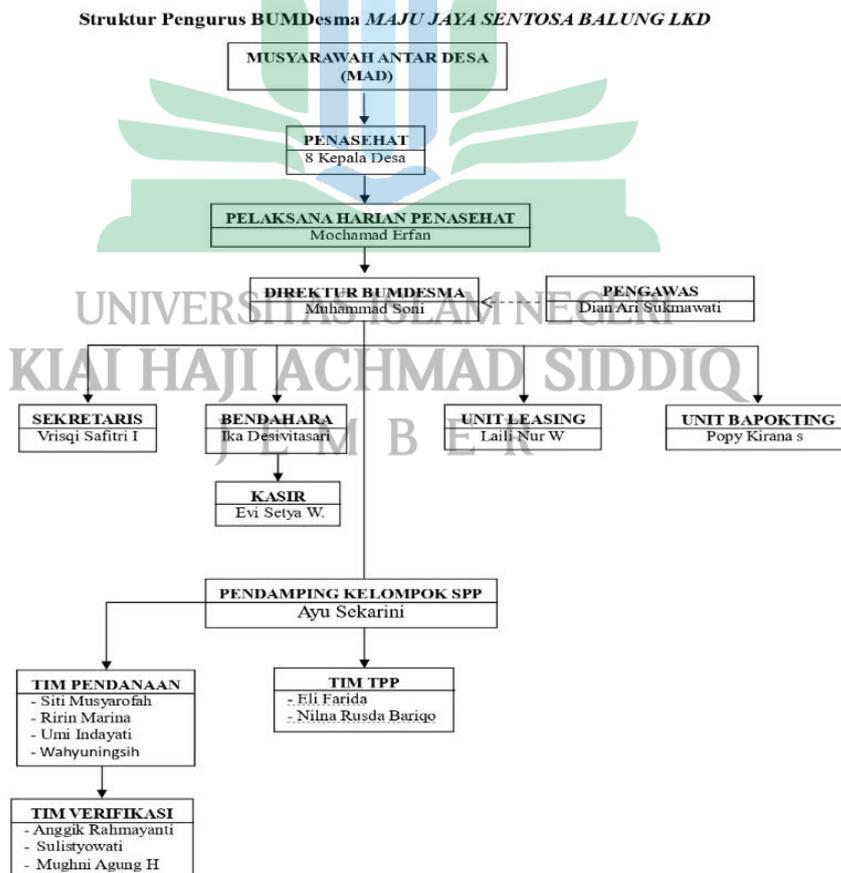
- 1) Meningkatkan unit usaha simpan pinjam sebagai usaha pokok BUMDesa Bersama.
- 2) Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang bergerak pada sektor rill ataupun jasa publik.
- 3) Mewujudkan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat kecamatan Balung.
- 4) Membangun infrastruktur dasar Kawasan perdesaan yang mendukung perekonomian kawasan perdesaan.
- 5) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- 6) Mengelola program yang masuk ke wilayah antar desa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Melestarikan adat istiadat, budaya dan kearifan lokal.
- 8) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan.
- 9) Mengembangkan kredit barang secara berkala dengan profit yang meningkat.

10) Mengembangkan Bapokting yang telah berjalan selama satu tahun dengan menambah kerjasama dengan distributor-distributor untuk bisa bersaing di masyarakat.⁶³

3. Struktur Organisasi BUMDesma Maju Jaya Sentosa

Struktur organisasi pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa terdiri dari Musyawaran Antar Desa (MAD), para penasehat yang menjabat oleh 8 (delapan) kepala desa, direktur, dan pengawas. Struktur organisasi BUMDesma Maju Jaya Sentosa adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD



Sumber: Data diolah dari hasil

⁶³ Vrisqi Safitri, diwawancara oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi UPK secara umum sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BUMDesma Maju Jaya Sentosa di Kecamatan Balung.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan BUMDesma Maju Jaya Sentosa.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen BUMDesma Maju Jaya Sentosa.
- d. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan SPP maupun sumber dana lain dari program pemerintah dan swasta.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjaman.

Sedangkan tugas dari karyawan BUMDesma secara khusus sebagai berikut:

- a. Ketua BUMDesma
 - 1) Melakukan pengendalian terhadap personal UPK.
 - 2) Memimpin rapat UPK.
 - 3) Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
 - 4) Menyetujui atau menolak pengajuan dana sekretaris dan bendahara.
 - 5) Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja dan menyusun perencanaan keuangan terhadap biaya operasional UPK.

- 6) Menandatangani surat-surat keluar, laporan, specimen rekening Bank, pencairan dana ke desa atau kelompok, kuitansi pembayaran, setoran pinjaman, surat perjanjian dan lain sebagainya yang diamanatkan oleh MAD.
 - 7) Melakukan validasi dan verifikasi seluruh dokumen keuangan dan kegiatan dana bergulir.
 - 8) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat desa dan kecamatan.
 - 9) Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kepada BKAD.
 - 10) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam dan penagihan kepada kelompok.
- b. Sekertaris BUMDesma
- 1) Bertanggung jawab atas pengarsipan dokumen dan data informasi lainnya.
 - 2) Mengisis dan mencatat agenda kegiatan harian dan daftar hadir pengurus.
 - 3) Menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan UPK, Laporan perkembangan pinjaman, hasil keputusan MAD ke desa dan atau masyarakat melalui papan informasi atau media informasi lainnya.
 - 4) Mengelola barang-barang inventaris dan sarana kerja lainnya.
 - 5) Membuat surat-surat.
 - 6) Mencatat proses dan keputusan rapat.
 - 7) Memegang buku daftar hadir pengurus.
 - 8) Menerima proposal kelompok.

- 9) Evaluasi singkat usulan pinjaman dari kelompok, meliputi: latar belakang kelompok, kondisi kelompok, riwayat pinjaman kelompok, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman.
- 10) Melakukan rekapitulasi usulan pengajuan pinjaman per anggota kelompok.
- 11) Melaporkan rekapitulasi pengajuan kelompok pada ketua Dana Bergulir Masyarakat.
- 12) Meyiapkan format kegiatan verifikasi kelompok.
- 13) Menyiapkan dokumen periapan pelaksanaan musyawarah pendanaan perguliran.
- 14) Menyiapkan dokumen pencairan ke kelompok (SPK, BA pencairan, kartu angsuran kelompok, buku administrasi kelompok).
- 15) Melakukan pembinaan administrasi kelompok.
- 16) Mengisi kartu angsuran kelompok di UPK.
- 17) Membuat laporan LPP (form 80), collectibilitas (form 81), laporan perkembangan kelompok (form 84 a,b,c), laporan realisasi perguliran dan proposal kelompok (form 2b).
- 18) Melakukan pengarsipan dokumen pengelolaan dana bergulir.
- 19) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam dan penagihan ke kelompok.

c. Bendahara BUMDesma

- 1) Mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan, menyimpan bukti transaksi dan memegang uang kas.

- 2) Memegang semua buku rekening Bank dana UPK.
 - 3) Membuat laporan keuangan kegiatan perguliran.
 - 4) Melakukan pembayaran uang atas persetujuan ketua.
 - 5) Menyetor uang ke Bank.
 - 6) Melakukan tugas lain yang relevan dalam pengelolaan kegiatan dana bergulir.
 - 7) Melakukan pengarsipan dokumen pengelolaan keuangan.
 - 8) Melakukan pembinaan terhadap kelompok pinjaman dan penagihan ke kelompok.
- d. Kasir BUMDesma
- 1) Menerima saldo kas pada pembukuan kas harian dari bendahara Bumdesma.
 - 2) Menerima angsuran kelompok dan mencatatnya dalam buku kas harian.
 - 3) Membantu bendahara dalam pengarsipan slip angsuran kelompok.
 - 4) Membantu bendahara dalam penyetoran uang ke Bank.
 - 5) Menyerahkan saldo kas harian pada bendahara setelah tutup jam kas.
 - 6) Membuat BA *cash opname* setelah jam tutup kas.
 - 7) Melakukan pengarsipan kas harian dan BA *cash opname*.
 - 8) Melakukan tugas lain yang relevan dalam pengelolaan kegiatan dana bergulir.⁶⁴

⁶⁴ Vrisqi Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

4. Unit Usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa

Di Tahun 2024 hingga saat ini BUMDesma Maju Jaya Sentosa mengelola tiga kegiatan usaha, diantaranya sebagai berikut:

a. Unit Usaha Dana Bergulir Masyarakat

Unit usaha dana bergulir ini adalah sama halnya dari Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang kemudian diganti dengan unit usaha dana bergulir masyarakat. Unit usaha dana bergulir ini merupakan usaha pertama yang dijalankan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa yang saat ini sudah berdiri kurang lebih 16 tahun. Kegiatan ini dikhususkan untuk para perempuan saja tujuannya agar dapat mempermudah kegiatan kaum perempuan, mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan.

BUMDesma ini memberikan pinjaman paling rendah sebesar Rp 2.000.000 hingga paling tinggi sebesar 10.000.000. Terdapat 270 kelompok SPP yang tercatat pada tahun 2024 di kecamatan Balung.⁶⁵

b. Unit Usaha Kredit Barang

Unit usaha kredit barang ini merupakan pinjaman bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang membutuhkan barang-barang seperti elektronik, emas, furniture dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Proses pengajuan kredit barang ini bisa dilakukan dengan memberikan fotocopy KTP peminjam dan Fotocopy KTP ahli waris yang

⁶⁵ Ika Devitasari, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 14 April 2025.

diserahkan kepada pihak manager kredit barang dan akan diproses melalui seleksi administrasi, selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan selang beberapa hari proses pencairan.

Proses pencairan dilakukan di kantor BUMDesma Maju Jaya Sentosa melalui Manager Kredit Barang. Kredit barang ini ada batas minimal dan maksimal pencairan sama dengan unit usaha DBM yakni dari 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pelaksanaan Kegiatan kredit barang ini dilakukan oleh satu orang yakni Manager Kredit barang karena Usaha ini masih terbilang baru berdiri. Perbedaan antara Dana Bergulir masyarakat dengan Kredit Barang di Bumdesma adalah proses dari pengajuan sampai pencairan lebih cepat Kredit barang karena pengajuan kredit barang ini dilakukan perorangan sehingga setelah lolos proses seleksi administrasi/berkas bisa langsung melaksanakan proses ferivikasi dan pencairan. Perkembangan kredit barang dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang sangat pesat hingga 100% dari target karena peminat kredit barang di kecamatan balung sangat baik.⁶⁶

c. Unit Usaha Bapokting (Bahan Pokok Penting)

Bapokting ini merupakan usaha selanjutnya kegiatan dana bergulir. Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun dimana pelaksanaan penjualan barang berupa bahan pokok penting (Bapokting) secara teknis penjualan secara langsung yang terjadi

⁶⁶ Evi Setya Wardani, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 14 April 2025.

antara penjual dan pembeli dan dilakukan ditempat dengan metode pembayaran secara cash. Mangsa pasar yaitu ketika ada pencairan pada usaha dana bergulir tiap anggota diwajibkan berbelanja pada usaha bapokting ini karena seluruh anggota ini adalah perempuan yang pasti membutuhkan bahan pokok untuk rumah tangga.

Pada tahun 2024 bapokting ini bekerjasama dengan Bulog Kabupaten Jember dengan di fasilitasi oleh Bupati Jember sehingga BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini bisa ikut berperan menyediakan bahan pangan bersubsidi melalui penjualan Beras Bulog SPHP 5kg ke masyarakat serta bekerjasama dengan distributor minyakita yang dapat memberikan harga pesaing dipasaran. Seiring berjalannya waktu Bapokting ini menyediakan banyak produk-produk rumah tangga yang dibutuhkan masyarakat setempat baik untuk keseharian maupun kosmetik. Perkembangan bapokting ini meningkat dengan adanya berbagai produk baru yang ditawarkan oleh pengelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan memberikan efek yang sangat baik bagi peminat konsumen karena harga yang ditawarkan murah dan bisa dijadikan harga grosir maupun ecer.⁶⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses selanjutnya dalam skripsi ini adalah penyajian data. Penyajian data merupakan tahap penelitian dimana informasi yang terkumpul dan disajikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta analisis data yang relevan.

⁶⁷ Vrisqi Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 14 April 2025.

Adapun disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada focus penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Neraca atau bisa disebut dengan laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi yang menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis.⁶⁸ Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁶⁹

Dalam penerapan akuntabilitas sangat penting terutama pada BUMDesma, karena tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang diberikan untuk meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada penerapan akuntabilitas BUMDesma Maju Jaya Sentosa setiap tahunnya memaparkan hasil laporan keuangannya kepada pihak yang berwenang, seperti kepala desa di Kecamatan Balung, dan

⁶⁸ Ivan Gumilar, H. Azhar Azhar Affandi, Laely Purnamasari, Denok Sunarsi, *Analisis Laporan Keuangan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 12-13.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iRFUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pengertian+neraca+keuangan&ots=HWlitP0pWA&sig=XAw7NGqbUFjVwbaIPii9rjbvqzA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

⁶⁹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2021), 18.

masyarakat Kecamatan Balung. Memaparkan laporan keuangan dari BUMDesma kepada pihak yang berwenang merupakan bentuk tanggung jawab dan sebagai bukti bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah menjalankan tugas yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dalam pencatatan laporan posisi keuangan (neraca) dan pelaporan. Akuntabilitas dalam pencatatan laporan keuangan neraca pada BUMDesma selalu dipantau oleh pengawas, MAD (Musyawarah Antar Desa), dan kepala desa. Penerapan akuntabilitas tersebut dapat terwujud jika pihak dari BUMDesma dapat menjalankan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Balung, Masyarakat, dan kepada pihak pemerintahan. Pada hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Soni selaku Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa sebagai berikut: “Jadi akuntabilitas itu kan tanggung jawab ya dek, kita itu punya tanggung jawab penuh terhadap laporan keuangan ini seluruh karyawan disini dan semua kegiatan, nah kalo sudah diberi tanggung jawab kalo dilanggar ya dapat resiko.”⁷⁰

Pernyataan dari Bapak Mohammad Soni dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab yang pasti memberikan resiko jika tanggung jawab tersebut dilanggar oleh pihak BUMDesma tersebut: Jadi seluruh karyawan BUMDesma bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan terutama pada laporan keuangannya.

⁷⁰ Mohammad Soni, diwawancara oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

Berikut adalah hasil wawancara ibu Vrisqi Safitri selaku Sekertaris BUMDesma Maju Jaya Sentosa menyampaikan sebagai berikut: “Akuntabilitas itu tanggung jawab dek, jadi tanggung jawab kita biasanya itu buat LPJ itu nanti kita laporkan ke pihak yang berwenang untuk dicek, kalo menurut saya sih akuntabilitas itu tanggung jawab pada pekerjaan yang kita kerjakan ya khususnya ini ke laporan keuangan.”⁷¹

Pernyataan dari ibu Vrisqi Safitri dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab pekerja terhadap pekerjaan yang diberikan dan harus dilaporkan oleh pihak yang berwenang dalam laporan bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). Menurut ibu Ika Desivitasari selaku Bendahara dari BUMDesma Maju Jaya Sentosa menyampaikan:

“Kalau untuk akuntabilitas ini kami semua mempunyai tanggung jawab masing-masing ya dek, jadi tanggung jawab kita disini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku jadi saya dan teman-teman sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan tugasnya dan sudah sesuai dengan prosedurnya begitu. Kita juga pasti membuat laporan pertanggung jawaban untuk membuktikan kepada pihak yang bersangkutan.”⁷²

Menurut ibu Ika selaku bendahara di kantor BUMDesma, akuntabilitas adalah tanggung jawab kepada tugas-tugas yang diberikan dengan cara membuktikan kinerja kerja dan memberikan bukti laporan yang sudah dibuat yaitu LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada pihak yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas diketahui jika akuntabilitas penting bagi pengelolaan BUMDesma, dan pihak

⁷¹ Vrisqi Safitri, diwawancara oleh Penulis, Balung, 14 April 2025.

⁷² Ika Devitasari, diwawancara oleh Penulis, Balung, 14 April 2025

BUMDesma sudah mengetahui tanggung jawab masing-masing yang diberikan dan sudah mengetahui cara menjalankan tanggung jawab tersebut. Bentuk pertanggung jawaban dari BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini adalah membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari semua anggaran hingga kegiatan dan pencapaian hasil.

Pengelolaan laporan keuangan harus disusun oleh setiap lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan. Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambil keputusan, karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dan dapat dipercaya.⁷³ Laporan keuangan pada dasarnya digunakan untuk alat komunikasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. Akuntabilitas finansial dapat terpenuhi apabila laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan indikator dan pengukuran dari akuntabilitas finansial. Ada 3 indikator dalam akuntabilitas finansial yaitu tentang integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan. Berikut adalah hasil wawancara dari 3 indikator dari akuntabilitas finansial, sebagai berikut:

a. Integritas Keuangan

Integritas keuangan merupakan kejujuran dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Sikap yang diambil yaitu pegawai harus berperilaku jujur dan tidak memihak dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat

⁷³ Muhammad Sawir, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022), 2.

menampilkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Menurut wawancara dari Bapak Mohammad Soni selaku Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah itu, nanti transaksi yang berupa pemasukan sama pengeluaran uang itu kita masih menggunakan pencatatan manual dicatat sama bendahara. Kalau nge-input itu pakai software atau komputer itu dikerjakan sama sekertaris. Jadi itu sudah ada tugasnya masing-masing nanti kalau semisal ada kesalahan apa ada yang keliru itu kita tau bagian siapa. Dan kita pasti ngecek ulang terus dek sampai benar jadi kalau ada kesalahan itu bisa dipertanggung jawabkan.”⁷⁴

Penjelasan dari Bapak Soni diatas dapat diketahui jika transaksi yang dilakukan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini masih menggunakan metode manual, pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing dan ada pengecekan ulang untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Sekertaris BUMDesma yaitu ibu Vrisqi sebagai berikut:

“Kejujuran itu hal harus diutamakan dalam segi apapun termasuk ya laporan keuangan ini, setiap transaksi yang kita lakukan itu harus transparan sesuai sama prosedur, maka dari itu kita punya kewajiban masing-masing tugasnya ada sendiri-sendiri setiap karyawan. Kita semua disini berusaha semampunya kita untuk terbuka mulai dari laporan keuangan, sampai kita juga melibatkan masyarakat dalam forum-forum bertanggung jawaban.”⁷⁵

Menurut penjelasan dari ibu Vrisqi diatas dapat diketahui jika kejujuran ialah hal yang paling utama dari segalanya termasuk laporan keuangan, setiap transaksi yang dilakukan oleh BUMDesma

⁷⁴ Mohammad Soni, diwawancara oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

⁷⁵ Vrisqi Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 14 April 2025.

transparansi dan sesuai dengan prosedur. Bentuk integritas keuangan pada BUMDesma ini melibatkan masyarakat untuk mengetahui pertanggung jawaban dari pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ika selaku bendahara BUMDesma Maju Jaya Sentosa, sebagai berikut:

“Kita wajib banget jujur itu, ya kalau tidak jujur kan gak kira dipercaya nanti sama masyarakat. Juga kita itu ada peraturannya itu dek. Saya juga melakukan pencatatan transaksi itu setiap hari, kalau pekerjaan saya lagi banyak banget nanti ya pasti dibantu sama mbak vrisqi (sekertaris), intinya itu kan ada 2 orang yang mengurusnya jadi ya tentu harus menerapkan jujur itu.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan ibu Ika dapat disimpulkan bahwa integritas keuangan memang harus diterapkan dalam BUMDesma Maju Jaya Sentosa terutama pada laporan keuangannya. Karena hal tersebut dapat membuat kepercayaan masyarakat Kecamatan Balung kepada BUMDesma Maju Jaya Sentosa bahwa dana desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Dari penjelasan diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah yaitu ibu Ita nasabah BUMDesma Maju Jaya Sentosa yang menyampaikan bahwa:

“Sepengetahuan saya sih mbak mereka jujur apa adanya ya, karna kan mereka mesti satu tahun sekali itu ada rapat sama MAD yang menunjukkan LPJ. Nah nanti itu mereka akan menjelaskan hasil kerjanya disitu mbak karna saya sendiri hadir disitu. Kalau dalam laporan keuangan sepengetahuan saya sih kalau ada yang setor pasti langsung dicatat mbak, kan setiap

⁷⁶ Ika Devitasari, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 14 April 2025.

kelompok itu ada bukunya masing-masing jadi langsung dicatet disitu.”⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan laporan keuangan di BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini sudah sesuai dengan indikator integritas laporan keuangan. Hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing dimana jika terjadi kesalahan maka langsung terdeteksi, selain itu pencatatan laporan keuangannya dilakukan secara manual. Bentuk integritas laporan keuangan dari BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini melibatkan masyarakat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dari hal tersebut laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan.

b. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan proses menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, dan dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan laporan keuangan. Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Soni selaku Direktur BUMDesma yang menyatakan tentang pengungkapan, sebagai berikut:

“Kalau pengungkapan laporan keuangannya itu kita memberikan ke PMD, diberikan juga ke kepala desa biasanya kita melakukan itu setiap bulan ya, kalau LPJ itu kita berikan

⁷⁷ Ita, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 23 April 2025.

ketika ada pertemuan MAD. Isinya LPJ ya semua kegiatan, ada laporan keuangannya juga kegiatan operasional juga dan lain-lain.”⁷⁸

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengungkapan laporan keuangan diberikan kepada PMD semua kepala desa di Kecamatan Balung. Sedangkan LPJ diberikan ketika ada pertemuan bersama dengan MAD, isi dari LPJ yaitu semua kegiatan, laporan keuangan, kegiatan operasional. Pernyataan dari Bapak Soni juga disampaikan oleh ibu Vrisqi selaku sekretaris BUMDesma, sebagai berikut:

“Pengungkapannya kita ya sama dengan yang disampaikan pak Soni dek, kalau diberikan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sama ke Kepala Desa setiap bulan dek. Kita membuat laporan pertanggung jawaban atau LPJ, sebelum kita serahkan ke PMD sama Kepala Desa kita sudah memastikan kalau LPJ itu sudah ada tanda tangan dari badan pengawas, direktur sama bendahara. Kita menyampaikan ke masyarakat laporan secara umum Ketika pertemuan MAD itu tentang kondisi laporan keuangannya.”⁷⁹

Dalam wawancara dengan sekretaris BUMDesma, dapat diketahui bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa rutin menyusun laporan keuangan setiap bulan yang kemudian diserahkan kepada PMD dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Balung. Selain itu, BUMDesma Maju Jaya Sentosa juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang kemudian dipaparkan pada pertemuan MAD. Setiap LPJ telah ditanda tangani oleh Badan Pengawas, Direktur, dan Bendahara guna menjamin keabsahan data untuk dapat dipertanggung

⁷⁸ Mhammad Soni, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

⁷⁹ Vrisqi Savitri, diwawancara oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

jawabkan. Ibu Ika sebagai Bendahara BUMDesma menjelaskan bahwa:

“Saya sebagai bendahara punya tanggung jawab penuh atas laporan keuangan ini ya dek, jadi penerimaan, pengeluaran, menyusun laporan keuangan tahunan bulanan itu saya yang mengehandle. Sebelum dipaparkan kepada MAD itu dicek dulu sama direktur dan pengawas, kalau sudah benar baru ditanda tangani lalu diberikan ke PMD dan kepala desa. Ketika diadakan pertemuan MAD nanti pihak PMD juga memantau kinerja kita apakah sudah sesuai dengan target, bagaimana kondisi keuangan dan pengelolaan keuangan apa sudah sesuai dengan SK dinas, nanti kita juga menyampaikan apakah ada masalah nanti itu kita diskusikan gimana solusinya dan nanti kita buat perencanaan baru lagi.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BUMDesma, dapat diketahui bahwa tanggung jawab laporan keuangan mulai dari penerimaan, pengeluaran, menyusun laporan keuangan setiap bulan dan setiap tahun. Pelaporan kepada MAD sebelumnya sudah dilakukan pengecekan oleh Badan Pengawas dan Direktur dengan benar kemudian ditanda tangani oleh Badan Pengawas, Direktur dan Bendahara yang kemudian diberikan kepada PMD dan Kepala Desa serta dipublikasikan secara terbuka melalui forum MAD. Pada forum tersebut PMD akan mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh BUMDesma, setelah itu semua pihak yang hadir dalam forum tersebut akan mencari solusi dari permasalahan yang ada serta melakukan perencanaan kinerja baru untuk kedepannya. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Ita selaku nasabah BUMDesma Maju Jaya Sentosa bahwa:

⁸⁰ Ika Devitasari, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

“Pengungkapan itu kan sama saja kaya disampaikan gitu ya mbak, kalau menurut saya sih bentuk penyampaian seperti yang tadi saya bilang kalau BUMDesma ini ada rapat MAD yang membahas soal LPJ setiap tahunnya mbak. Jadi sudah sesuai sama aturannya mbak karena yang hadir bukan cuman masyarakat saja tetapi juga ada kepala desa sama orang dinas juga. Jadi semua tau bagaimana isi dari laporan keuangan itu.”⁸¹

Dari pernyataan ibu Ita menjelaskan bahwa, BUMDesma Maju Jaya Sentosa melaksanakan rapat MAD yang menjelaskan isi dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap tahunnya dan mengungkapkan isi kondisi dan bentuk keuangan dan kinerjanya. Pada pelaksanaan rapat MAD tersebut dihadiri oleh berbagai pihak yaitu nasabah BUMDesma Maju Jaya Sentosa, Kepala Desa Kecamatan Balung, dan pihak pemerintahan, hal tersebut adalah kesempatan bagi BUMDesma Maju Jaya Sentosa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat untuk mengungkapkan kinerjanya dan kondisi keuangannya dalam pengelolaan keuangan yang ada di Kecamatan Balung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa memenuhi indikator akuntabilitas yaitu pada pengungkapan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Direktur, Sekertaris, Bendahara, dan Nasabah BUMDesma Maju Jaya Sentosa yaitu bentuk pengungkapan pada pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa adalah laporan keuangan disetorkan pada setiap bulan

⁸¹ Ita, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 23 April 2025.

kepada pihak PMD dan seluruh kepala desa di Kecamatan Balung. Sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilaporkan ketika melaksanakan rapat MAD. Dari hal tersebut pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa memberikan informasi kepada yang berkepentingan terhadap kinerja yang dilakukan, dari pengungkapan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban BUMDesma Maju Jaya Sentosa serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat Balung terhadap BUMDesma Maju Jaya Sentosa yang menimbulkan nilai baik.

c. Ketaatan

Ketaatan menunjukkan bahwa entitas bukan hanya mampu mengelola dana saja, tetapi dapat bertanggung jawab secara hukum dan etis. Pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi, peraturan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Soni terkait dengan ketaatan dalam akuntabilitas sebagai berikut:

“Sejauh ini kita selalu mentaati peraturan undang-undang yang berlaku ya dek, kita juga punya undang-undang sendiri dalam BUMDesma ini. Kalau tidak salah undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 jadi kita mempunyai pedoman undang-undang tersebut untuk mengelola BUMDesma Maju Jaya Sentosa.”⁸²

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDesma memiliki peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu dijelaskan pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur

⁸² Mohammad Soni, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Disampaikan oleh ibu Vrisqi selaku Sekertaris BUMDesma Maju Jaya Sentosa bahwa:

“BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini dek termasuk BUMDesma yang terbaik pada tahun 2024 kalau tidak salah ya, itu ya dikarenakan kinerja kita sudah sesuai dengan peraturan yang diberikan sama PMD. Laporan keuangannya juga dibuat itu sesuai dengan peraturannya dek, jadi kita tinggal ngikutin aja”.⁸³

Dari wawancara yang disampaikan oleh ibu Vrisqi dapat disimpulkan bahwa, BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal laporan keuangannya, laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh PMD. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Ika selaku Bendahara BUMDesma Maju Jaya Sentosa bahwa:

“Kalau tidak salah ada peraturan pemerintahnya itu Nomor 11 Tahun 2021. Jadi ya kita semuanya disini patuh ya ke peraturan itu tentunya. Dalam laporan keuangan juga kita sudah melaksanakan apa yang diberikan oleh pihak PMD, kalau bentuk ketaatannya itu kita rutin ngasihkin laporan keuangan ke PMD sama Kepala Desa setiap bulan.”⁸⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara oleh ibu Ika bahwa, bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan dalam indikator ketaatan, BUMDesma Maju Jaya Sentosa menyetorkan laporan keuangannya setiap bulan kepada dinas PMD dan Kepala Desa. Dan dalam bentuk akuntabilitasnya BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah

⁸³ Vrisqi Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

⁸⁴ Ika Devitasari, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah yaitu pada PP Nomor 11 Tahun 2021.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, BUMDesma Maju Jaya Sentosa mengelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021. Sedangkan dalam hal penyusunan laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa sesuai dengan standar yang diberikan oleh pihak PMD.

2. Penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut akuntansi syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Laporan laba rugi merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui apakah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menghasilkan keuntungan atau malah memberikan kerugian.⁸⁵ Dalam suatu usaha pasti akan mendapatkan kerugian maupun keuntungan, dalam akuntabilitas laporan laba rugi menunjukkan sikap pertanggung jawaban manajemen atas kinerja keuangan yang disampaikan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan standar. Laporan laba rugi menunjukkan berapa besaran pendapatan dan beban yang akhirnya menghasilkan laba atau rugi.

⁸⁵ Alvia Yanti, Fitriyah Nurhidayah, "Pentingnya Pemahaman Akuntansi Sederhana Sebagai Solusi Untuk Menyusun Laporan Keuangan (Studi Kasus pada UD Rian Arianto Farm)" *Jurnal Akuntansi* Vol. 9 No. 2 (2020), 188.
https://eprints.upi.ac.id/id/eprint/5010/1/Fitriyah_Nurhidayah_Pentingnya_Pemahaman_Akuntansi_Sederhana_Sebagai_Solusi_untuk_Menyusun_Laporan_Keuangan.pdf

Penerapan akuntabilitas laporan laba rugi dapat dilihat dalam pencatatan laporan keuangan pada BUMDesma, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa, sebagai berikut:

“Laporan keuangan laba rugi itu dokumen yang sangat penting ya dek, karena mencatat semua mulai dari pendapatan sama beban jadi kita bisa gampang lihatnya apakah rugi atau untung. Kita sangat terbuka dengan laporan laba rugi jadi masyarakat dan yang berkepentingan itu tau dana itu dikelola dengan baik atau tidak. Kalau sejauh ini Alhamdulillah kita belum pernah rugi.”⁸⁶

Penjelasan yang disampaikan Bapak Soni diketahui bahwa, laporan keuangan laba rugi merupakan dokumen yang sangat penting dalam pencatatan laporan keuangan, dokumen tersebut mencatat seluruh pendapatan dan beban pada periode tertentu. Dengan adanya pencatatan tersebut maka pihak BUMDesma dapat melihat dengan jelas apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Pihak BUMDesma juga sangat terbuka terhadap laporan keuangan laba rugi agar masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah dana desa dikelola dengan baik penjelasan lain juga disampaikan oleh ibu Ika selaku Bendahara BUMDesma, sebagai berikut:

“Kalau rugi sih gak pernah ya dek, Alhamdulillah kita selalu untung. Kalau menurutku ya laba rugi itu semacam catatan yang nunjukin besaran pendapatan dan beban BUMDesma dalam 1 periode, biasanya perbulan kalo ngga ya per tahun. Laporan ini bisa jadi bukti untuk yang punya kepentingan dan mereka bisa tau uang desa itu dipakai dan dihasilkan gimana. Kita juga mencatat setiap hari pemasukan sama pengeluarannya itu nanti dijadikan laporan.”⁸⁷

⁸⁶ Mohammad Soni, diwawancara oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

⁸⁷ Ika Devitasari, diwawancara oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa, BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini belum pernah mengalami kerugian dalam usaha, laporan laba rugi adalah catatan yang menunjukkan seberapa besar pendapatan dan beban dalam satu periode. Laporan laba rugi dapat dijadikan bukti kepada yang berkepentingan, masyarakat dapat mengetahui dana desa yang digunakan dan yang dihasilkan seberapa besar. Pihak BUMDesma mencatat setiap hari Ketika terdapat pemasukan dan pengeluaran yang kemudian berbentuk laporan laba rugi.

3. Kendala dalam penerapan akuntabilitas laporan keuangan syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Kendala merupakan hambatan atau halangan yaitu suatu kondisi dimana kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Jadi kendala adalah suatu masalah yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan yang dicapai. Kendala pasti juga mempunyai Solusi atau jalan keluar yang sesuai dengan kendala yang dihadapi.⁸⁸ Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan hal tersebut sesuai dengan wawancara Bapak Soni Selaku Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa, sebagai berikut:

“Kalau soal akuntabilitasnya itu tidak ada dek, mungkin kalau dalam pembuatan laporan keuangannya ada jadi kita masih menggunakan Teknik manual dan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selain itu tidak ada sih karena kita sudah mematuhi pemerintah juga standar yang sudah ditetapkan. Kalau

⁸⁸ Ratih Septianingrum, “Analisis Kendala-Kendala Dalam Pembelajaran Online Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV MI Ma’arif 18 Trimurjo Lampung Tengah” (Skripsi, IAIN METRO Lampung, 2020) 8.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4233/1/SKRIPSI%20RATIH%20fix%20-%20Ratih%20Septianingrum.pdf>

ada perubahan dari pihak PMD langsung kasih informasi ke kita jadi kita tinggal ngikutin aturan yang dirubah itu.”⁸⁹

Penjelasan dari Bapak Soni dapat diketahui bahwa, penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak mempunyai kendala. Tetapi dalam pembuatan laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa memiliki kendala yaitu pada sistem akuntansi yang dimana mereka masih menggunakan teknik manual yang dicatat menggunakan Microsoft Excel, selain itu BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak memiliki kendala karena BUMDesma ini sudah mengikuti peraturan pemerintah dan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat perubahan terhadap peraturan baru pihak PMD akan memberitahukan kepada pihak BUMDesma untuk mengikuti peraturan tersebut. Dengan adanya regulasi tersebut pihak BUMDesma tidak mengalami kesulitan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat dan akuntabel. Ibu Vrisqi selaku Sekertaris BUMDesma Maju Jaya Sentosa menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk penerapan akuntabilitasnya itu tidak ada ya, karena sudah dari dulu itu kita diwajibkan membuat laporan keuangan yang sudah sesuai sama aturan jadi sekarang sudah bisa menyesuaikan aja sih dan sekarang sudah bisa. Mungkin masalahnya cuman ada di sistem informasi akuntansinya sih mbak kita masih manual.”⁹⁰

Penjelasan diatas selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Soni yaitu dalam akuntabilitas laporan keuangan BUMDesma Maju

⁸⁹ Mohammad Soni, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

⁹⁰ Vrisqi Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

Jaya Sentosa tidak memiliki kendala, akan tetapi dalam pembuatan laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa masih menggunakan sistem informasi secara manual dan pembuatan laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dari ibu Ika selaku Bendahara BUMDesma Maju Jaya Sentosa juga menjelaskan bahwa:

“Kalau pembuatan laporan keuangannya tidak ada karena kita sudah sesuai dengan aturan, kalau akuntabilitasnya juga tidak ada sih dek, kita lebih ke sistem pencatatannya aja ya yang masih menggunakan excel jadi kita harus teliti banget dan sedikit lama kalau pas membuat laporannya itu. Tapi saya dibantu sama sekertaris buat ngeinput uangnya jadi ya cepet kalau berdua.”⁹¹

Dalam wawancara yang dilakukan oleh ibu Ika disampaikan bahwa pembuatan laporan keuangan tidak mengalami kendala apapun berarti hal tersebut dikarenakan proses pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PP Nomor 1 Tahun 2021. Namun demikian kendala yang ditemukan terdapat pada sistem pencatatan yang masih menggunakan aplikasi Excel secara manual, meskipun teknik ini membutuhkan ketelitian yang tinggi dan waktu yang lama dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu Bendahara BUMDesma dibantu oleh Sekertaris dalam menginput nominal keuangan untuk mempercepat kinerja.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini dijelaskan temuat terkait penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan pada usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

⁹¹ Ika Devitasari, diwawancarai oleh Penulis, Balung, 21 April 2025.

Kabupaten Jember. Penulis mengulas hubungan antara data lapangan dengan teori yang relevan. Pembahasan diuraikan secara terperinci sesuai dengan focus masalah yang sudah ditetapkan.

1. Penerapan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Neraca menurut Akuntansi Syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dan yang memiliki hak dan kewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pihak pengelola BUMDesma Maju Jaya Sentosa sangat baik dalam akuntabilitas laporan keuangannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengurus BUMDesma Maju Jaya Sentosa pada wawancara diatas, yang menyatakan bahwa akuntabilitas pada laporan keuangan sangatlah penting dan sudah menjadi tanggung jawab pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa. Pengelolaan laporan keuangan setiap bulan dan LPJ dapat menjadikan bukti kepada pihak yang memberi amanah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa mengadakan rapat MAD sehingga dalam forum tersebut BUMDesma dapat menyampaikan informasi terkait kinerja yang telah

⁹² Muhammad Sawir, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022), 3.

dilakukan. Pada pernyataan tersebut selaras dengan konsep teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo.

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggung jawaban lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, serta tidak ada dana yang dikorupsi. Pada penelitian ini, peneliti tertarik pada akuntabilitas finansial akan terpenuhi jika laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan indikator dalam akuntabilitas finansial. Terdapat 3 indikator dalam akuntabilitas finansial yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan.

a. Integritas Keuangan

Integritas keuangan adalah kejujuran dalam menampilkan laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa yaitu BUMDesma Maju Jaya Sentosa mempunyai pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional dan proses pembuatan laporan keuangannya. Dalam pencatatan laporan keuangan Bendahara BUMDesma dibantu oleh Sekertaris BUMDesma sehingga laporan keuangan di BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan dan dalam pencatatan laporan keuangan pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Pengungkapan

Pengungkapan berarti proses menyampaikan informasi keuangan yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Proses pengungkapan disajikan sebagai gambaran dari segala proses kejadian pada periode tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa yaitu pengungkapan laporan keuangan pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa disampaikan pada dua mekanisme: pertama, laporan keuangan BUMDesma secara rutin disampaikan kepada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan seluruh kepala desa di Kecamatan Balung. Kedua, menyampaikan laporan keuangan pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) dilaksanakan dengan bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). BUMDesma Maju Jaya Sentosa dalam menyampaikan laporan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Informasi yang disampaikan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa secara terbuka pada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana pemerintah. Dengan adanya pengungkapan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan kepada para pihak yang berkepentingan terhadap kinerja BUMDesma Maju Jaya Sentosa.

c. Ketaatan

Pada setiap lembaga tentunya harus mengikuti peraturan terutama dalam proses pembuatan laporan keuangan, karena setiap lembaga pasti memiliki peraturan masing-masing yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mengelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam penyusunan laporan keuangan dan proses pembuatan laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah melakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh dinas PMD, maka dari itu pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa sudah sesuai dengan 3 indikator dalam akuntabilitas finansial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDesma Maju Jaya Sentosa sudah bertanggung jawab atas dana pemerintah yang digunakan untuk masyarakat Kecamatan Balung guna meningkatkan kesejahteraan dan membantu ekonomi. Dengan adanya hal tersebut BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah menrapkan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Jika dievaluasi dalam teori agensi maka, hubungan antara pemerintah sebagai principal dan pengelola BUMDesma sebagai agen menggambarkan suatu sistem dimana agen diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Dalam hal tersebut akuntabilitas menjadi mekanisme penting untuk mengurangi risiko *asimetri informasi* dan *moral hazard*, serta memastikan agen yaitu BUMDesma bertindak sesuai dengan kepentingan principal (pemerintah dan masyarakat). Dengan menyusun laporan keuangan secara transparan dan sesuai dengan standar, BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah memenuhi peran sebagai agen secara optimal, serta menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana publik.

Dari sudut pandang teori stakeholder, keberhasilan BUMDesma Maju Jaya Sentosa dalam menerapkan akuntabilitas mencerminkan pemenuhan kewajiban terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat serta instansi yaitu PMD. Dengan menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, BUMDesma menunjukkan bahwa mereka memperhatikan hak informasi publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan berkomitmen pada prinsip keadilan sosial. Laporan keuangan dapat

menjadi sarana dalam membangun partisipasi, evaluasi, dan pengawasan yang sehat.

Dalam sudut pandang akuntansi syariah, laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yaitu shiddiq (jujur), amanah, tabligh (transparansi), dan keadilan. Prinsip akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap standar teknik pelaporan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah menerapkan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah yaitu jujur dalam menampilkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi, transparan dalam mengungkap laporan keuangan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktivitas, amanah dalam menjalankan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat secara profesional dengan adanya hal tersebut maka, BUMDesma Maju Jaya Sentosa menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menunjukkan upaya menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara adil. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak hanya berfungsi sebagai alata kontrol adminisstratif, tetapi juga menjadi refleksi dari niali-nilai etis. Keadilan tidak hanya terbatas pada memberikan hak yang sama, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan kesejahteraan

dan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat.

2. Penerapan Akuntabilitas dalam laporan keuangan Laba Rugi menurut Akuntansi Syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Menurut Kuswadi, laporan laba rugi menggambarkan besarnya jumlah pendapatan dan biaya dalam satu periode sehingga informasi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan kinerja.⁹³ Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban suatu entitas pada periode tertentu. Berdasarkan penelitian yang diteliti di BUMDesma Maju Jaya Sentosa, laporan keuangan laba rugi adalah dokumen yang sangat penting untuk mencatat seluruh pendapatan dan beban pada periode tertentu. Dengan adanya laporan tersebut BUMDesma Maju Jaya Sentosa dapat dengan mudah menilai kondisi keuangan, apakah mengalami kerugian atau keuntungan. BUMDesma Maju Jaya Sentosa menunjukkan keterbukaan terhadap laporan laba rugi sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat menilai pengelolaan dana desa secara transparan. Hingga sampai saat ini BUMDesma Maju Jaya Sentosa belum pernah mengalami kerugian dalam usahanya. Laporan laba rugi dapat menjadi bukti akuntabilitas, publik dapat melihat seberapa besar dana desa yang digunakan dan dihasilkan dan proses pencatatan yang dilakukan setiap

⁹³ Umy Mukhofifah, Miguani, dkk, "Perancangan Sistem Pelapodaan Keuangan Berbasis Web (Studi Kasus Pada PT. EMKL Tirtasari Abadi Sejahtera Semarang)" *IJSE Indonesian Journal on Software Engineering* Vol. 2 No. 1 (2016).

hari saat terjadi pemasukan dan pengeluaran, kemudian disusun menjadi laporan laba rugi. Hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuswadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan laba rugi sangat membantu pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa dimana pihak BUMDesma dapat membaca laporan keuangan dengan jelas. Sehingga pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa dapat mencatat seluruh pendapatan dan beban dan dengan mudah menilai kondisi laporan keuangan tersebut apakah terdapat kerugian dan keuntungan. Hingga sampai saat ini BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak pernah mengalami kerugian, hal ini terjadi dikarenakan prinsip akuntabilitas yang ada di BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah diterapkan oleh karyawannya dengan sangat baik.

Dalam laporan keuangan syariah, praktik yang dilakukan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi, yaitu kejujuran, amanah, transparansi, dan keadilan. Prinsip akuntabilitas syariah yang ditetapkan oleh para karyawan BUMDesma Maju Jaya Sentosa turut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan memenuhi tanggung jawab sosial sesuai dengan nilai-nilai islam.

3. Kendala dalam penerapan Akuntabilitas laporan keuangan pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Kendala adalah hambatan, rintangan dan kesulitan yang menghalangi tercapainya suatu tujuan atau menghambat proses suatu kegiatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021, serta mengikuti standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat perubahan pada regulasi, pihak PMD selalu memberikan informasi kepada BUMDesma Maju Jaya Sentosa untuk segera menyesuaikan. Namun kendala yang dihadapi pada sistem pencatatan laporan keuangan yang masih menggunakan teknik manual yaitu menggunakan Microsoft Excel. Dalam hal tersebut bendahara BUMDesma Maju Jaya Sentosa harus mempunyai ketelitian yang tinggi dan memakan waktu dalam proses penyusunan. Hal tersebut dapat diatasi dengan dibantunya bendahara oleh sekertaris dalam menginput data keuangan guna mempercepat proses dan menjaga ketepatan laporan. Meskipun demikian laporan yang dihasilkan tetap akurat dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak memiliki kendala dalam akuntabilitasnya, karena BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah

mamatuhi peraturan pemerintah. Namun, kendala yang dihadapi oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa adalah pada pencatatan laporan keuangan yang masih menggunakan teknik manual yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel, hal ini dapat menghambat penyelesaian dalam pembuatan laporan keuangan. Akan tetapi, bendahara pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini dibantu oleh sekretaris BUMDesma Maju Jaya Sentosa sehingga dapat mempercepat kinerja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Syariah Pada Usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD Kabupaten Jember”, maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas yang dilaksanakan pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa menggunakan dimensi akuntabilitas finansial dikarenakan teori tersebut dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami tentang “Akuntabilitas” dalam mempertanggung jawabkan segala aktivitas dalam pelaporan keuangan pada pihak yang berwenang untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Indikator dari akuntabilitas finansial ada 3 yaitu, integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan, pengelolaan laporan keuangan BUMDesma Maju Jaya Sentosa sesuai dengan 3 indikator akuntabilitas finansial. Kondisi yang diungkapkan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa adalah kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan dan laporan keuangan yang dibuat dan dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh dinas PMD. Dalam teori agensi maka, hubungan antara pemerintah sebagai principal dan pengelola BUMDesma sebagai agen menggambarkan suatu sistem dimana agen diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang teori stakeholder, keberhasilan

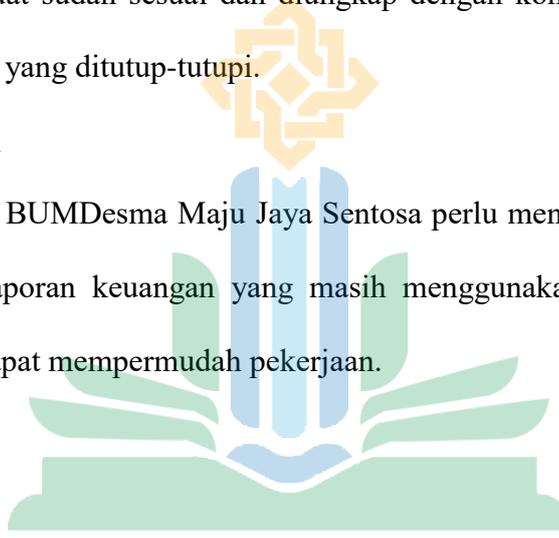
BUMDesma Maju Jaya Sentosa dalam menerapkan akuntabilitas mencerminkan pemenuhan kewajiban terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat serta instansi yaitu PMD. Maka dari itu, laporan keuangan syariah, praktik yang dilakukan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah yaitu shiddiq (jujur), amanah, tabligh (transparansi), adil.

2. Pada laporan laba rugi, BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak memiliki kendala apapun dalam hal akuntabilitas, hal ini menunjukkan bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mematuhi peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa/BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa). Dan sebagai bukti bahwa BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah mengelola laporan keuangan dengan benar dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku BUMDesma Maju Jaya Sentosa selalu mendapatkan laba dan tidak pernah mengalami kerugian, dikarenakan setiap usaha yang didirikan oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa telah berkembang dengan baik. Prinsip akuntabilitas syariah yang ditetapkan oleh para karyawan BUMDesma Maju Jaya Sentosa turut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengalami kerugian.
3. Kendala yang dimiliki oleh BUMDesma Maju Jaya Sentosa adalah pada proses pencatatan laporan keuangannya masih menggunakan teknik manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel, karena hal tersebut maka proses pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati untuk

menghindari kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan. Namun, dalam akuntabilitasnya BUMDesma Maju Jaya Sentosa tidak memiliki kendala apapun, hal ini dikarenakan BUMDesma Maju Jaya Sentosa selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan ketika ada peraturan baru maka BUMDesma Maju Jaya Sentosa langsung menerapkan. Laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dan diungkap dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

B. Saran-Saran

Pihak BUMDesma Maju Jaya Sentosa perlu mengatasi masalah dalam pencatatan laporan keuangan yang masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel agar dapat mempermudah pekerjaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Neneng Musyrifatul, Muhammad Taufiq Hidayat, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa DiKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing* Vol. 5 No. 1 (2024).
- Ana, Angelina Trimurti Rambu, Linda Lomi Ga, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus Ina HUK)” *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* Vol. 9 No. 1 (2021).
- Apriliany, Nabila, Cantik Prameswari, dan Dra Kushdanajani, “Analisis Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Bumdesma Mandiri Sejahtera Pati)” *Journal of Politic dan Government Studies* Vol. 11 No. 3 (2022).
- Ariani, Ida, Lince Bulutoding, Namla Elfa Syariati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory” *Islamic Accounting and Finance Review* Vol. 3 No. 1 (2022).
- Asmoro, Wiwiek Kusumaning, Novie Astuti Setianingsih, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan *Good Governance* di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri” *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2019).
- Aziiz, Muhammad Nur, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi akuntabilitas Dana Desa” *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol. 6 No. 2 (2019).
- Basri, Muhammad, dkk, "Nilai-Nilai Sejarah Berbasis Local Wisdom Situs Batu Berak Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no.2 (2020).
- Budianto, Senator Iven, Nur Ika Mauliyah, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” *SIMBA Seminar Inovasi Majemen Bisnis dan Akuntansi* 3 (2021).
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, Miah Said, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021).
- Harahap, Riva Ubar, Januri, dan Surya Sanjaya, “Implementasi SAK-45 Laporan Keuangan Nirlaba Pada Masjid Muhammadiyah Kota Medan” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 8 No. 2 (2021).
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV pustaka Ilmu, 2020).

- Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).
- Hidayat, Wastam Wahyu, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
- <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/171/129>.
- Humaira, Dipha Rizka, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang” *Jurnal Ilmu Pemerintah Suara Khatulistiwa (JIPSK)* vol. VII No. 02 (2022).
- Ikhsan, Amrul, Musfiari Haridhi, “penerapan standar Akuntansi keuangan syariah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* vol. 2 no. 3 (2017).
- Jamaluddin, Anwar Enre, “Kontruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh” *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol. 5 No. 2 (2023).
- Kartini, Endang, Lalu Mimbar, Izrawati, “Impelementasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan pada UMKM krupuk di kota Mataram” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* vol. 6 no. 1
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah dan Terjemahannya*, 45.
- Kurniawan, Badrudin, “Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi Kasus BUMDesma Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Propo Kab. Pamekasan) “*Parlindungan Arief Nasution Publika* Vol. 11 No. 2 (2023).
- Kusuma, Firda and Nur Ika Mauliyah, “Analysis of The Implementation of Behavioral Accounting Aspects And Understanding of The Village Funds Allocation (Add) In Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District”, *Journal of Student Academic Research* Vol. 5 No. 2 (2020), 57.
- Lestari, Tirta Ayu, Citra Indah Merina, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4 No. 5 (2022).
- Mahardika, Muhammad, Adi Prasetyo, Firda Ayu Amalia, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid” *Jurnal Akuntansi* Vol. 13 No. 2 (2022).

- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2021).
- Mais, Rimi Gusliana, Lini Palindri, “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa “*Jurnal Akuntansi Dan Governance* Vol. 1 No. 1 (2020).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2021).
- Masruroh, Nikmatul, Samsul Arifin, dkk, “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 2 (2023).
- Maulana, Abrar Fauzi, Ridwan, “Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami’ di Kota Banda Aceh)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 5 No. 2 (2020).
- Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020).
- Mukhofifah, Umy, Miguani, dkk, “Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web (Studi Kasus Pada PT. EMKL Tirtasari Abadi Sejahtera Semarang)” *IJSE Indonesian Journal on Software Engineering* Vol. 2 No. 1 (2016).
- Naslikhah, Siti Aminatun, Yuni Sukandani, Mutiara Rachman Ardhani, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo” *Journal of Sustainability Business Research* Vol. 3 No. 3 (2022).
- Oktaviani, Intan, Cepi Saepuloh, “Analisis Penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Itqan” *MES Management Journal* Vol. 3 No. 1 (2024).
- Pratiwi, Alda, “Implementasi standar akuntansi keuangan syariah terhadap koperasi simpan pinjam dan pembiayaan bakti huria syariah di kota Palopo” *Repository UPT. Perpustakaan* (2020).
- Princessa, Shierly Tiara, Zulhelmy, Nina Nursida, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Penyalai Kecamatan X Koto Sumatera Barat” *Journal of Islamic Finance and Accounting Research* Vol. 1 No. 2 (2022).
- Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, dkk, “Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa” *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* Vol. 07 No. 01 (2019).

- Putri, Tria Shaliha, Fitrotun Niswah, “strategi pengelolaan badan usaha milik desa bersama (BUMDesMa) di kecamatan sumbergempol kabupaten Tulungagung” *Journal Publika* vol. 9 no. 4 (2021).
- Ramadhani, Widya Nur, “Optimalisasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa dalam Pengembangan BUMDES (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sumbawa) *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 2021.
- Rifai, Fuad Yanuar Akhmad, Nuwun Priyono, “Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam Kajian Literatur” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* Vol. 3 No. 2 (2020).
- Salihi, Ignasius Ridwan Hutauruk, Hasnarika, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bitan” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* Vol. 2 No.6 (2023).
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Saputri, Melan, Hoei Kylie Christine Abigail, Meidieta Livana, “Penerapan Teori Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* vol. 1 no. 4 (2024).
- Sawir, Muhammad, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022).
- Septianingrum, Ratih, “Analisis Kendala-Kendala Dalam Pembelajaran Online Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV MI Ma’arif 18 Trimurjo Lampung Tengah” (Skripsi, IAIN METRO Lampung, 2020).
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4233/1/SKRIPSI%20RATIH%200fix%20-%20Ratih%20Septianingrum.pdf>
- Seto, Agung Anggoro, dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Subroto, Vivi Kumalasari, Ani Endaryati, *Kumpulan Teori Akuntansi* (Semarang: Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan Universitas STEKOM, 2023)

- Suci, Fadhilah Sukma, Bambang Waluyo, Ida Syafrida, “Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok “*Simposium Nasional Akuntansi Vokasi* Vol. 14 No. 17 (2024).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suprianik, Nilufarul Izzabillah, “Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan APBD Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Bondowoso” *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol. 2 No. 1 (2024), 290. <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/412/306>
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah’, *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol.1No.1 (2023).
- Syahrman, “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Narasindo Mitra Perdana” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Wahuyingtyas, Endah Tri, Niken Savitri Primasari, dkk, *Analisis Laporan Keuangan Syariah* (Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, 2021).
- Wahyuni, Sri, Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 (2021).
- Wirawan, Oryza A., “26 Badan Usaha Milik Desa Bersama Resmi Berdiri di Jember“ 30 Januari 2023, Berita Jatim.com, 18:38. <https://beritajatim.com/26-badan-usaha-milik-desa-bersama-resmi-berdiri-di-jember>.
- Yanti, Alvia, Fitriyah Nurhidayah, “Pentingnya Pemahaman Akuntansi Sederhana Sebagai Solusi Untuk Menyusun Laporan Keuangan (Studi Kasus pada UD Rian Arianto Farm)” *Jurnal Akuntansi* Vol. 9 No. 2 (2020). https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/5010/1/Fitriyah_Nurhidayah_-_Pentingnya_Pemahaman_Akuntansi_Sederhana_Sebagai_Solusi_untuk_Menyusun_Laporan_Keuangan.pdf

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metodelogi Penelitian | Fokus Penelitian |
|---|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--|
| Implementasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Usaha Bumdesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD Kabupaten Jember | Laporan Keuangan Syariah | Laporan Keuangan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Laporan Keuangan b. Tujuan Laporan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa Blung LKD. b. Bendahara BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Penelitian: Kualitatif b. Jenis Penelitian: Deskriptif c. Teknik Penelitian: <i>Purposive</i> d. Teknik Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi e. Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> a) Pengumpulam data b) Reduksi data c) Penyajian data d) Verifikasi atau penarikan kesimpulan f. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber g. Tahap-tahap Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> a) Tahap Persiapan Penelitian b) Tahap penelitian lapangan c) Analisis data | <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan neraca menurut syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung? b. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan laba rugi menurut syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung? c. Bagaimanakah kendala dalam penerapan akuntabilitas laporan keuangan syariah pada BUMDesma Maju Jaya Sentotsa Balung? |
| | Akuntabilitas | Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Akuntabilitas b. Manfaat Akuntabilitas c. Komponen-komponen Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> c. Pengelola Keuangan d. Nasabah | | |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nahdiatul Fitria

Nim : 214105030060

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Implementasi Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Syariah pada Usaha BUMDEsma Maju Jaya Sentosa Balung LKD Kabupaten Jember”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 30 April 2025



Nahdiatul Fitria
NIM. 214105030060

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah Sejarah BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini?
2. Apakah visi dan misi BUMDesma Maju Jaya Sentosa ini?
3. Bagaimana struktur organisasi di BUMDesma Maju Jaya Sentosa?
4. Bagaimana cara kerja karyawan pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa?
5. Ada berapa usaha yang ada di BUMDesma Maju Jaya Sentosa?
6. Bagaimanakah usaha pada unit usaha dana bergulir tersebut?
7. Bagaimanakah usaha pada unit usaha kredit barang tersebut?
8. Bagaimanakah usaha ada unit usaha bapokting tersebut?
9. Menurut Bapak/Ibu Akuntabilitas dalam laporan keuangan itu apa?
10. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada BUMDesma Maju Jaya Sentosa?
11. Menurut bapak/ibu apakah penerapan akuntabilitas dalam BUMDesma sudah jujur dalam pengelolaan laporan keuangan?
12. Menurut bapak/ibu apakah penerapan akuntabilitas dalam BUMDesma ini telah diungkap kepada masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan?
13. Menurut bapak/ibu apakah penerapan akuntabilitas dalam BUMDesma ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan apakah BUMDesma ini taat akan peraturan tersebut?
14. Dalam menjalankan usaha pada BUMDesma ini, apakah pihak BUMDesma pernah mengalami rugi dan dalam hitungan berapa mengalami kerugian tersebut?
15. Dan apakah pihak BUMDesma terus mengalami peningkatan dalam pemasukan/laba pada usaha tersebut?
16. Dan apakah laporan laba rugi telah diungkap kepada masyarakat dalam kondisi yang sebenar-benarnya tanpa ada yang disembunyikan?
17. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan akuntabilitas pada laporan keuangan?
18. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan usaha atau diluar akuntabilitas tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-33 /Un.22/7.a/PP.00.9./01/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 Januari 2025

Kepada Yth.

BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung

Jl. Kalimantan No. 157, Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68155

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nahdiatul Fitria
NIM : 214105030060
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah Pada Usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD Kabupaten Jember" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
BUMDESMA MAJU JAYA SENTOSA BALUNG
SK. MENKUMHAM NOMOR : AHU-00633.AH.01.35.TAHUN 2022
DUSUN KARANG ANYAR DESA BALUNG LOR
KECAMATAN BALUNG - KABUPATEN JEMBER

Sekretariat : Jl. Kalimantan No. 127 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kode Pos 68161 Kabupaten Jember
Telp / WA : 0823 3825 6440

SURAT KETERANGAN
NO. 003 / BUMDESMA-MJSB / V / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SONI, SE**
NIK : 3509102611800001
Tempat. Tgl Lahir : Jember, 26 Nopember 1980
Alamat : Dsn, Balung Kopi Krajan RT.003 RW. 002 Desa Balung Kidul
Kecamatan Balung.
Jabatan : Direktur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NAHDATUL FITRIA**
NIM : 214105030060
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Dsn Krajan I RT. 001 Rw. 004 Desa Karang Duren
Kecamatan Balung.

Telah selesai melakukan penelitian Skripsi sejak tanggal 08 Februari sampai 22 Februari 2025 dengan judul
“ Implementasi Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Syariah pada Usaha Bumdesma Maju Jaya Sentosa Balung
LKD Kecamatan Balung Kabupaten Jember “.

Jember, 05 Mei 2025
Direktur

MOHAMMAD SONI, SE

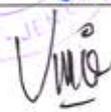
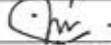
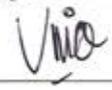


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nahdiatul Fitria

NIM : 214105030060

Judul : Implementasi Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah Pada Usaha BUMDesma Maju Jaya Sentosa Balung LKD Kabupaten Jember

| No. | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Paraf |
|-----|---------------------|--|---|
| 1. | 8 - Februari - 2025 | Melakukan observasi dan memberikan surat izin penelitian. |  |
| 2. | 21 - April - 2025 | Melakukan wawancara dengan Direktur BUMDesma Maju Jaya Sentosa oleh bapak Mohammad Soni. |  |
| 3. | 14 - April - 2025 | Melakukan wawancara dengan sekretaris BUMDesma Maju Jaya Sentosa oleh ibu Vrisqi Safitri |  |
| 4. | 14 - April - 2025 | Melakukan wawancara dengan bendahara BUMDesma Maju Jaya Sentosa dengan ibu Ika Desivitasari. |  |
| 5. | 14 - April - 2025 | Melakukan wawancara dengan kasir BUMDesma Maju Jaya Sentosa oleh Evi Setya Wardani. |  |
| 6. | 22 April - 2025 | Melakukan wawancara dengan Nasabah BUMDesma Maju Jaya Sentosa. |  |
| 7. | 21 - April - 2025 | Melakukan wawancara dengan Penasihat BUMDesma Maju Jaya Sentosa Bapak Mochamad Erfan. |  |
| 8. | 21 - April - 2025 | Melakukan sesi dokumentasi |  |
| 9. | 05 - Mei - 2025 | Penerimaan Surat Keterangan Selesai Penelitian. |  |

Jember, 16 April 2025

Direktur BUMDesma


 Mohammad Soni, S.E.

LAPORAN LABA/RUGI
DANA BERGULIR MASYARAKAT
BUMDESMA MAJU JAYA SENTOSA LKD BALUNG
Periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Kecamatan : Balung
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

| A | PENDAPATAN | | Tahun Berjalan (S/d Bulan Lalu) | Bulan Ini | Tahun Berjalan (S/d Bulan Ini) |
|---|------------|--|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | 4.1 | Pendapatan Operasional | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 4.1.1 | Jasa Pengembalian UEP | - | - | - |
| | 4.1.2 | Jasa Pengembalian SPP | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 4.1.3 | Pendapatan Operasional Lain-lain | - | - | - |
| | | | | | |
| | 4.2 | Pendapatan Non Operasional | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 4.2.1 | Bunga Bank Operasional | xxxxxxx | - | xxxxxxx |
| | 4.2.2 | Bunga Bank Pengembalian UEP | - | - | - |
| | 4.2.3 | Bunga Bank Pengembalian SPP | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | | | | | |
| | 4.3 | Pendapatan Non Operasional Lain-2 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | | | | | |
| | | Total Pendapatan | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

| B | BIAYA OPERASIONAL | | Tahun Berjalan (S/d Bulan Lalu) | Bulan Ini | Akumulasi |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| | 5.1 | Biaya Dana | - | - | - |
| | 5.1.7 | Biaya Dana (Cost of Fund) | - | - | - |
| | 5.1.1 | Dana Program Kerjasama | | | - |
| | | | | | |
| | 5.2 | Biaya Operasional | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5.2.1 | Honor Pengurus | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5.2.2 | Administrasi dan Umum | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5.2.3 | Transport | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5.2.4 | Biaya Dibayar Dimuka | - | - | - |
| | 5.2.5 | Penyusutan | - | - | - |
| | 5.2.6 | Lain-lain | - | - | - |
| | | | | | |
| | 5.3 | Biaya Penghapusan Pinjaman | - | | - |
| | | | | | |
| | 5.4 | Biaya Non Operasional | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5.4.1 | Pajak Bank Operasional | xxx | - | xxx |
| | 5.4.2 | Pajak Bank Pengembalian UEP | | | - |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| | | | - | - | |
| 5.4.3 | Pajak Bank Pengembalian SPP | | xxxxxx | xxx | xxx |
| 5.4.4 | Administrasi Bank Operasional | | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5.4.5 | Administrasi Bank Pengembalian UEP | | - | - | - |
| 5.4.6 | Administrasi Bank Pengembalian SPP | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5.4.7 | Non Operasional Lain-lain | | - | - | - |
| | - BPUPK | - | - | - | - |
| | - MAD Non Reguler | - | - | - | - |
| | - Verifikasi | - | - | - | - |
| | - IPTW | - | - | - | - |
| | - Lain-Lain | - | - | - | - |
| | Total Biaya | | - | - | - |
| | Surplus | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Jember, 31 Desember 2024

Diperiksa dan diketahui Oleh :

**Disetujui
Oleh:**

Dibuat oleh :

Pengawas

Pelaksana Harian

Direktur

Bendahara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

NERACA
NERACA DANA BERGULIR MASYARAKAT
BUMDESMA MAJU JAYA SENTOSA LKD BALUNG
Per - 31 Desember 2024

Kecamatan : Balung
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

| AKTIVA | | | PASIVA | | |
|------------|----------------------|----------|----------|----------------------|---------|
| 1 | HARTA | | 2 | HUTANG | |
| 1.1 | Kas | | 2.1 | Capacity Building | xxxxxxx |
| 1.1.1 | Kas BPNPM | - | 2.2 | Bantuan Langsung RTM | xx |
| 1.1.2 | Kas Operasional | - | 2.3 | Hutang Lain-Lain : | xx |
| 1.1.3 | Kas Pengembalian UEP | - | | | |
| 1.1.4 | Kas Pengembalian SPP | - | | | |
| | Total Kas | - | | | |
| 1.2 | Bank | | 3 | MODAL | |
| 1.2.1 | Bank BPNPM | - | 3.1 | Modal Awal Leasing | xxxxxxx |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|------|-----------------------------------|---------|
| 1.2.2 | Bank Operasional | xxxxxxx | 3.2 | Tambahan modal | xxxxxxx |
| 1.2.3 | Bank Pengembalian UEP | - | 3.3 | Transfer dari KPKN PPK Fase-3 | - |
| 1.2.4 | Bank Pengembalian SPP | xxxxxxxx | 3.4 | Transfer dari KPPN PNPM-PPK | - |
| | Total Bank | xxxxxxx | 3.4 | Transfer dari KPPN PNPM-MPd | - |
| | | | 3.5 | Dana Matching Grant / PPK Mandiri | - |
| 1.3 | Piutang | | 3.6 | Dana Cost Sharing PPK Fase-3 | - |
| 1.3.1 | Piutang UEP | - | 3.7 | Dana Cost Sharing PNPM-PPK | - |
| 1.3.2 | Piutang SPP | xxxxxxx | 3.8 | Dana Cost Sharing PNPM-MPd | - |
| 1.3.3 | Piutang Lain | | 3.9 | Dana Hibah Pihak Ketiga | - |
| | Total Piutang | xxxxxxx | 3.10 | Surplus Ditahan | xxxxxxx |
| | | | 3.11 | Surplus Berjalan | xxxxxxx |
| 1.4 | Biaya dibayar dimuka | - | | | |
| | Akumulasi Amortisasi | - | | | |
| | Nilai Buku | - | | | |
| | | | | | |
| 1.5 | Aktiva Tetap | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | - | | | |
| | Akumulasi Penyusutan | - | | | |
| | Nilai Buku Aktiva Tetap | - | | | |
| | | | | | |
| 1.6 | Alokasi Desa Dalam Proses | | | | |
| 1.6.1 | Prasarana | | | | |
| 1.6.2 | Pendidikan | | | | |
| 1.6.3 | Kesehatan | | | | |
| 1.6.4 | Jenis Kegiatan Lain | | | | |
| 1.6.5 | Operasional Desa | | | | |
| | Total Dalam Proses | - | | | |
| | | | | | |
| 1.7 | Alokasi Desa Serah Terima | | | | |
| 1.7.1 | Prasarana | - | | | |
| 1.7.2 | Pendidikan | - | | | |
| 1.7.3 | Kesehatan | - | | | |
| 1.7.4 | Jenis Kegiatan Lain | - | | | |
| 1.7.5 | Operasional Desa | - | | | |

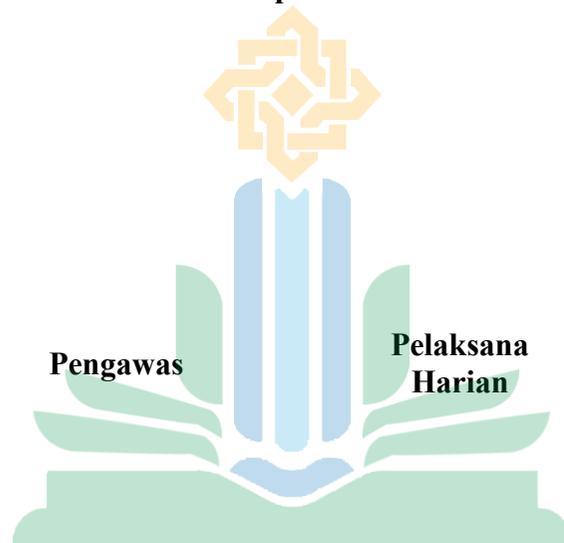
| | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------|
| | Total Serah Terima | - | | |
| 1.8 | Selisih Pencatatan | xxxxxxx | | |
| TOTAL AKTIVA | | xxxxxxx | TOTAL PASIVA | xxxxxxx |

Diketahui dan diperiksa oleh :

Menyetujui :

Jember, 31 Desember 2024

Dibuat oleh :



Direktur

Bendahara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi observasi BUMDesma Maju Jaya Sentosa



Dokumentasi wawancara bersama dengan Bapak Soni selaku Direktur BUMDESMA



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Vrisqi selaku sekretaris BUMDESMA



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Ika selaku Bendahara BUMDESMA



Dokumentasi wawancacara dengan Bapak Erfan selaku Penasehat BUMDESMA

BIODATA PENULIS



Nama : Nahdiatul Fitria
Nim : 214105030060
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 11 September 2003
Alamat : Dusun Krajan 1, RT/RW: 001/004, Karang Duren,
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
No. Telepon : 0817-0353-8748

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Hidayah : 2008-2010
2. MI Al-Hidayah : 2010-2016
3. SMP Al-Hidayah : 2016-2019
4. SMK Nuris : 2019-2021